

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor



KATA PENGANTAR

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan pemerintah sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan penganggaran dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPANRB) nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*), setiap unit penyelenggara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi, misi organisasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Pengelolaan Kinerja di Kementerian Keuangan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2014 serta Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-24/MK.1/2014 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan melaksanakan visi dan misi unit organisasi dari level di atasnya sebagaimana tergambar dalam

Peta Strategi Kemenkeu *Three KPPN* yang terdiri dari sejumlah Sasaran Strategis yang dikelompokkan dalam berbagai perspektif yaitu : Perspektif *Stakeholder*, Perspektif *Customer*, Perspektif *Internal Process*, dan Perspektif *Learning and Growth*.

Sasaran-sasaran Strategis tersebut dirinci lebih spesifik menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Pencapaian Sasaran Strategis tersebut diukur oleh IKU. Setiap IKU disertai dengan target yang menggambarkan kinerja yang harus dicapai, yang kesemuanya telah tertuang didalam Kontrak Kinerja. Dengan berakhirnya tahun anggaran 2022, maka bersama ini kami sampaikan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2022 sebagai gambaran pelaksanaan Kontrak Kinerja Kemenkeu *Three KPPN* Bogor Tahun 2022.

Tindak Lanjut Evaluasi Laporan Kinerja KPPN Bogor Tahun 2022 merupakan satu-kesatuan dengan LAKIN yang telah disusun sebelumnya sebagai evaluasi perbaikan. Harapan kami LAKIN ini secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu secara internal dapat memberi manfaat untuk meningkatkan kinerja KPPN Bogor pada masa selanjutnya sehingga pemenuhan tugas pokok dan fungsi sebagai perwujudan visi dan misi keberadaannya akan semakin baik

Bogor, 24 Januari 2023

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LAKIN) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor disusun sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas keberhasilan dan atau kegagalan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 KPPN Bogor telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan kinerja baik sebagai kantor vertikal di daerah..Seluruh kegiatan tersebut tingkat capaian kinerjanya telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Pencapaian kinerja KPPN Bogor pada tahun 2022 dapat diukur dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut :

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah mencapai target antara lain :

1. Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran sebesar 89,1 dari target 89
2. Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN sebesar 98,78 dari target 95
3. Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN sebesar 4,73 dari target 4,65
4. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu sebesar 99,88% dari target 99,4%
5. Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI sebesar 100% dari target 100%
6. Persentase Tingkat Implementasi Standardisasi Kompetensi Pejabat Perbendaharaan sebesar 92,07% dari target 90%
7. Tingkat efektivitas edukasi dibidang pengelolaan perbendaharaan sebesar 90,4 dari target 88,5
8. Persentase akurasi perencanaan kas sebesar 91,14% dari target 83%
9. Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas sebesar 4 dari target 3,15
10. Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar 99,26 dari target 90
11. Indeks Implementasi Digipay sebesar 3,83 dari target 3
12. Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker sebesar 95,04 dari target 90
13. Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA sebesar 4 dari target 3,25

14. Persentase Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu sebesar 99,77% dari target 98,5%
 15. Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis *Strategy Focused Organization* sebesar 85,82 dari target 84,5
 16. Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal sebesar 95,91 dari target 85
 17. Nilai rata –rata *hard competency* pegawai sebesar 91,17 dari target 78
 18. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN sebesar 99,33% dari target 95,5%
 19. Nilai kualitas LK Tingkat UAKPA dan UAKPB sebesar 93,1 dari target 83
 20. Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan sebesar 116,07 dari target 100
- B. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tidak mencapai target adalah N I H I L
- C. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang N/A (*Not Availabel*) adalah N I H I L

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai pada tahun 2022 diharapkan dapat dipertahankan dan diupayakan untuk dapat ditingkatkan di tahun 2023. Sedangkan beberapa kegiatan yang capaian kinerjanya belum pada tingkat yang optimal akan ditingkatkan pada tahun mendatang melalui berbagai upaya. Sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan keberhasilan tersebut, KPPN Bogor menyusun Laporan Kinerja setelah periode pelaksanaan Kontrak Kinerja Tahun 2022 berakhir. LAKIN ini disamping memuat rencana strategis dan rencana kerja tahunan, juga memuat realisasi, evaluasi hasil dan analisa atas pencapaian kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		I
IKHTISAR EKSEKUTIF		iii
DAFTAR ISI		v
DAFTAR TABEL		vi
DAFTAR GAMBAR		vii
BAB I	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	2
	B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
	C. Peran Strategis	5
	D. Sistematika Laporan	7
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	9
	A. Rencana Startegis	10
	B. Penetapan/Perjanjian Kinerja	13
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	20
	A. Capaian Kinerja Organisasi	21
	B. Realisasi Anggaran	62
	C. Kinerja Lainnya	70
BAB IV	PENUTUP	71

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja

DAFTAR TABEL

BAB I	PENDAHULUAN	
Tabel.1.1	Komposisi Pegawai berdasarkan Gender dan usia	5
Tabel.1.2	Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan	5
Tabel.1.3	Komposisi Pegawai berdasarkan pendidikan	5
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
Tabel.2.1	Target Kinerja tahun 2022	11
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
Tabel.3.1	Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tahun 2017 – 2022	21
Tabel.3.2	Capaian Kinerja Organisasi tahun 2022	22
Tabel.3.3	Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran 2021 dan 2022	62
Tabel.3.4	Pagu dan Realisasi per output/kegiatan	63

DAFTAR GAMBAR

BAB I	PENDAHULUAN	
Gambar.1.1	Foto Gedung KPPN Bogor, Jl. Ir. H. Juanda No. 62 Bogor	2
Gambar.1.2	Struktur Orgainsasi KPPN Bogor	4
BAB II	PERENCANAAN KINERJA	
Gambar.2.1	Kontrak Kinerja KPPN Bogor	14
Gambar.2.2	Perjanjian Kinerja KPPN Bogor	16
Gambar.2.3	Target Kinerja KPPN Bogor	18
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA	
Gambar 3.1	Piagam Penghargaan Akselerasi Pembinaan Jafung	59
Gambar.3.2	Piagam Penghargaan Implementasi KKP	59
Gambar 3.3	Piagam Penghargaan Nilai Capaian IKU PKPA	60
Gambar 3.4	Piagam Penghargaan Penilaian LK UAKBUN-D	60

BAB I

PENDAHULUAN

- A. LATAR BELAKANG**
- B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**
- C. PERAN STRATEGIS**
- D. SISTEMATIKA LAPORAN**

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 262/ PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor (KPPN Bogor) adalah instansi vertikal

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

KPPN Bogor dituntut untuk melaksanakan tugas dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai *prinsip good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam UU No.28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).



Gambar 1.1.

LAKIN KPPN Bogor Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPPN Bogor dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2022. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-

RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

KPPN Bogor adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan di wilayah Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016, KPPN mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

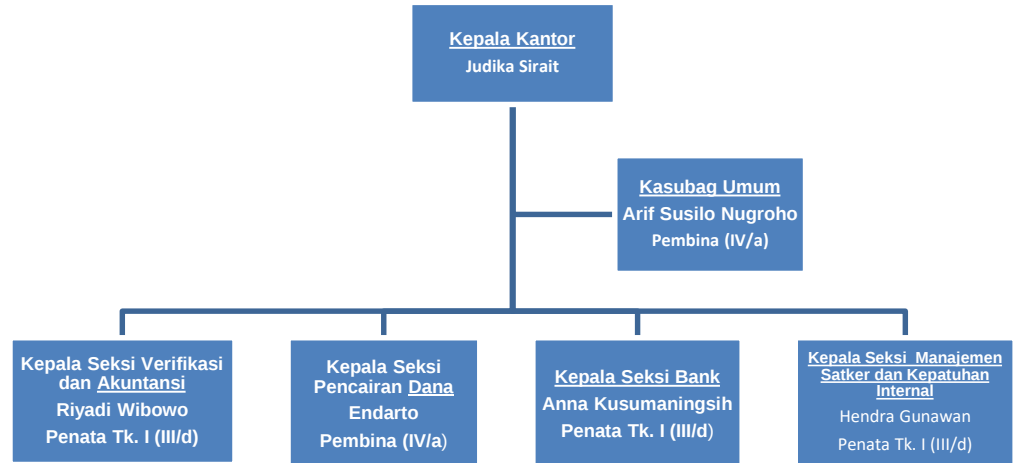
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana diatas, KPPN Bogor menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN);
- c. Penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- d. Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran negara melalui dan dari Kas Negara;
- e. Penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara;
- f. Pelaksanaan verifikasi transaksi keuangan dan akuntansi serta pertanggungjawaban bendahara;
- g. Pembinaan dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- h. Pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- i. Pelaksanaan manajemen mutu layanan;
- j. Pelaksanaan manajemen hubungan pengguna layanan (*customer relationship management*);
- k. Pelaksanaan tugas dan penyusunan laporan Pembina Pengelola Perbendaharaan (*treasury management representative*);
- l. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan sertifikasi bendahara;
- m. Pengelolaan rencana penarikan dana;
- n. Pengelolaan rekening pemerintah;
- o. Pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah;
- p. Pelaksanaan layanan bantuan (*helpdesk*) penenmaan negara;
- q. Pelaksanaan sistem akuntabilitas dan kinerja;
- r. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi Kredit Program;
- s. Pelaksanaan Humas dan layanan Keterbukaan Informasi Publik (KIP); dan
- t. Pelaksanaan administrasi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)

Untuk selanjutnya, guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, pada tahun 2020, KPPN Bogor mempunyai susunan organisasi terdiri dari :

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pencairan Dana;
- c. Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal;
- d. Seksi Bank;
- e. Seksi Verifikasi dan Akuntansi; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi KPPN Bogor



Gambar 1.2.

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia yang memadai tidak akan membawa ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Jumlah SDM KPPN Bogor menjadi tantangan tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang dibutuhkan. Pengelolaan SDM ditujukan demi terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan. KPPN Bogor sebagai suatu instansi vertikal unit eselon III di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki sumber daya manusia yang cukup posisi per 31 Desember 2022 sebanyak 33 pegawai. SDM tersebut didominasi oleh pegawai dengan usia diatas 50 tahun sebanyak 22 pegawai (56%) dan pegawai wanita sebanyak 24 pegawai (61%)

1. Sumber daya manusia berdasarkan gender dan usia

Gender		Usia			
Wanita	21	64%	Usia 20 s.d. 29 Tahun	1	3%
Pria	12	36%	Usia 40 s.d. 49 Tahun	13	39%
			Usia 50s.d. 59 Tahun	19	58%
	33	100%		33	100%

Tabel. 1.1.

2. Sumber daya manusia berdasarkan golongan

Golongan									Jumlah
	II/b	II/d	III/a	III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	
Pegawai	1	1	3	10	5	11	1	1	33
Persentase	3%	3%	9%	30%	15%	33%	3%	3%	100%

Tabel. 1.2.

3. Sumber daya manusia berdasarkan pendidikan

Pendidikan						Jumlah
	SMA	D I	DIII	S1	S2	
Pegawai	8	2	5	17	1	33
Persentase	24%	6%	15%	52%	3%	100%

Tabel. 1.3.

C. PERAN STRATEGIS

KPPN Bogor merupakan ujung tombak pelayanan Direktorat Jenderal Perbendaharaan kepada masyarakat dan sebagai pengelola perbendaharaan negara di wilayah kerjanya, yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor dan Kota Depok. KPPN Bogor mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai pengelola perbendaharaan, seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan termasuk KPPN Bogor diharapkan mampu menguasai bidang tugasnya dan memiliki pengetahuan dan keterampilan (*hard skill*) serta integritas/moralitas (*soft skill*) yang memadai dengan memanfaatkan penggunaan teknologi yang tepat guna dan tepat sasaran sehingga memudahkan sekaligus meningkatkan kualitas hasil kerja.

Seluruh jajaran KPPN Bogor diharapkan dapat mempertanggungjawabkan proses dan hasil pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan kepada publik/masyarakat, dengan memperhatikan kaidah-kaidah yang baik (*best practice*).

Mengingat peran strategis yang diemban oleh KPPN Bogor, sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus senantiasa berorientasi pada “Kepuasan Konsumen” yakni pelayanan kepada masyarakat tanpa mengabaikan ketentuan/prosedur yang berlaku.

Keberhasilan mengemban amanat ini, disadari akan sangat dipengaruhi oleh tiga komponen dominan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, yang ditopang oleh *Standard Operating Procedure* (SOP) yang senantiasa mengantisipasi perkembangan yang terjadi serta tersedianya dukungan teknis berupa tersedianya sarana dan prasarana. Disamping tiga komponen tersebut di atas, keberhasilan mengemban peran strategis jugadipengaruhi oleh unsur di luar lingkup organisasi, dalam hal ini budaya kerja yang bebas KKN yang sangat diharapkan oleh

masyarakat luas, serta komunikasi dan koordinasi dengan mitra kerja yang terjalin dengan baik.

Hasil akhir “peningkatan pelayanan kepada masyarakat” diwujudkan melalui penyusunan LAKIN KPPN Bogor tahun 2022 dengan penetapan rencana strategis, penetapan sasaran, indikator sasaran dan cara mencapai tujuan melalui penetapan kebijakan dan program-program kerja. Seluruh fungsi saling bersinergi dan terintegrasi penuh, baik antar seksi maupun pegawai yang ada di dalamnya. Sebagai suatu organisasi terbuka, KPPN Bogor berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal, seperti teknologi, ekonomi, undangundang, dan faktor sosial kemasyarakatan, serta selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki role model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan. Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, fungsi-fungsi treasury akan berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders. Konsep keterpaduan telah diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam penyelesaian.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah yang berisi informasi atas pencapaian sasaran strategis dan hambatan dalam pelaksanaan Kontrak Kinerja.

Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022, KPPN Bogor wajib menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men PAN-RB) Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja.

Agar mudah dipahami, penyajian LAKIN KPPN Bogor Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issues*) yang sedang dihadapi organisasi.

Pada bab ini memuat:

A. Latar Belakang

- Menyajikan informasi latar belakang penyusunan LAKIN

- B. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
 - Menyajikan informasi tugas, fungsi, dan struktur organisasi serta komposisi sumber daya manusia baik berdasarkan jenis kelamin, usia, pendidikan dan golongan.
- C. Peran Strategis
 - Menyajikan peran strategis organisasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta isu strategis yang sedang dihadapi.
- D. Sistematika Laporan
 - Menyajikan informasi sistematika atas LAKIN (Bab I s.d. Lampiran beserta penjelasan ringkas atas apa yang akan disajikan dalam setiap bab dan lampiran).

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

A. Rencana Strategis

Pada sub bab ini disajikan informasi visi, misi dan tujuan strategis tahun 2020-2024 serta target kinerja tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Renstra unit tahun 2020-2024.

B. Penetapan/Perjanjian Kinerja.

Pada sub bab ini disajikan informasi Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang memuat Peta Strategis unit, Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, Target Kinerja, dan pendanaan dalam rangka pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Tahun 2021 termasuk Addendum diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Penjelasan atas Refinement IKU yang menjelaskan perubahan IKU yang ditetapkan pada Kontrak Tahun 2022 dari tahun-tahun sebelumnya.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran.

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Kinerja Lain-Lain

Pada sub bab ini diuraikan mengenai simpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

Perjanjian Kinerja KPPN Bogor Tahun 2022, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2022, dan Lain-lain yang dianggap perlu.

Dengan sistematika laporan di atas, diharapkan LAKIN ini dapat mudah dipahami oleh internal KPPN Bogor khususnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta masyarakat luas pada umumnya guna terwujudnya tujuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

B. PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, KPPN Bogor mempunyai visi :

"Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel."

Dalam visi tersebut yang dimaksud dengan tugas Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara adalah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai suatu pernyataan yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, KPPN Bogor mempunyai misi adalah sebagai berikut:

1. Menjamin pelaksanaan pencairan dana APBN secara tepat, tepat, dan transparan.
2. Menatausahakan penerimaan negara secara profesional dan akuntabel.
3. Mewujudkan pelaporan keuangan yang akurat dan tepat waktu.
4. Meningkatkan kualitas satker dalam pengelolaan perbendaharaan.
5. Mengembangkan kompetensi SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan dukungan yang optimal bagi peningkatan pelayanan.

Adapun 10 (sepuluh) sasaran strategis KPPN Bogor yaitu :

1. Pengelolaan perbendaharaan negara yang akuntabel dan produktif
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel
4. Komunikasi, edukasi dan standardisasi yang berkesinambungan
5. Pengelolaan kas yang optimal
6. Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien
7. Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu
8. Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi
9. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang efisien, efektif dan akuntabel
10. Sistem informasi dan teknologi yang andal

Target kinerja yang telah ditetapkan yang tercantum dalam Kontrak Kinerja Tahun 2022 KPPN Bogor adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		1a-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4c-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90
		4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90
		6b-N Indeks Implementasi Digipay	3
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7.	Pertanggungjawaban keuangan Negara yang akuntabel	7a-CP Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja kementerian dalam ekosistem kolaboratif	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84,5
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85

		8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9.	Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	82
		9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan pengadaan	100%

Tabel 2.1.

Untuk memperoleh hasil yang maksimal, target dari sasaran strategis di atas perlu selalu dicermati dan dikelola secara benar. Mencermati dan memahami semua peraturan perundangan yang mendukung dengan benar serta dalam pengelolaannya harus menggunakan strategi maupun pemikiran-pemikiran yang rasional, analitis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk tercapainya tujuan dan sasaran yang diharapkan

Dengan memperhitungkan kekuatan maupun kekurangan yang dimiliki maupun peluang dan tantangan / ancaman yang dihadapi maka strategi KPPN Bogor sebagai berikut :

1. Strategi mengoptimalkan kekuatan memanfaatkan peluang yang ada.
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang cepat, harus cepat diantisipasi oleh segenap jajaran instansi dengan cara mengoptimalkan SDM dan peralatan yang kita miliki agar tidak ketinggalan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
2. Strategi mengurangi kelemahan untuk memanfaatkan peluang yang ada.
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi, tuntutan pelayanan, dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajibannya merupakan peluang yang harus dimanfaatkan, namun beberapa kendala yang dihadapi diantaranya 58% (19 dari 33) pegawai yang telah berusia di atas 50 tahun, serta keterbatasan dana. Untuk meminimalkan kelemahan tersebut dan memanfaatkan peluang yang ada maka perlu dilakukan penjagaan motivasi para pegawai agar kinerjanya terus bertahan serta pengoptimalan sarana dan prasarana yang ada.
3. Strategi menggunakan kekuatan untuk mengatasi tantangan.
Kekurangpahaman masyarakat maupun instansi/satker tentang mekanisme pengelolaan perbendaharaan negara yang baru sebagai akibat dari kurang tersedianya sarana informasi keuangan negara merupakan tantangan bagi KPPN Bogor untuk mewujudkan visi dan misinya. Namun dengan kemampuan SDM, tersedianya perangkat keras maupun perangkat lunak yang ada, dapat digunakan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan melakukan sosialisasi

peraturan perbendaharaan maupun peraturan-peraturan yang terkait lainnya secara berkesinambungan

4. Strategi mengurangi kelemahan untuk mengatasi tantangan.

Kelemahan disiplin pegawai dan orientasi pegawai yang kurang dapat diselesaikan dengan penegakan disiplin pegawai, mutasi pegawai dan pembinaan mental agama. Untuk mengatasi tantangan keterbatasan informasi keuangan negara dan kekurangan pemahaman masyarakat maupun instansi / satker didalam mengelola keuangan negara maka perlu diadakan Diklat maupun GKM sebagai bekal bagi pegawai untuk menyampaikan informasi yang benar dan juga meningkatkan pelayanan.

Dalam mengimplementasikan strategi tersebut, KPPN Bogor berusaha untuk meningkatkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan transparan dengan pengembangan sumber daya manusia yang profesional, kompeten dan berintegritas tinggi merupakan cermin budaya organisasi serta perwujudan kode etik pegawai anti korupsi.

**B. PENETAPAN/
PERJANJIAN
KINERJA**

Penetapan Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang merupakan Kontrak Kinerja KPPN Bogor dengan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat dijabarkan dalam 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi KPPN Bogor tahun 2022 seperti gambar di bawah ini:



KONTRAK KINERJA
NOMOR : 023/PB.22/2022
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapan pun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



Gambar 2.1.

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:

1. *Stakeholder Perspective*

Perspective ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.

2. Customer Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi.

3. Internal Proses Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi stakeholder dan customer (*value chain*).

4. Learning and Growth Perspective

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna menghasilkan output atau outcome organisasi yang sesuai dengan harapan customer dan stakeholder.

9 (Sembilan) sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif untuk tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pada tahun 2022, 9 (sembilan) Sasaran Strategis tersebut terdiri atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada gambar 2.2.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BOGOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	4a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		4b-N Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%
		4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (Skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	85
		6b-N Indeks implementasi <i>Digipw</i>	3 (Skala 4)
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (Skala 4)
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84,5
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Program/Kegiatan
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara,
dan Restiko

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Dedi Sopandi
NIP 196204241982101001

Anggaran
Rp. 2.442.972.090

Bandung, 31 Januari 2022

Pimpinan Unit Kerja,



Dedika Sirait
NIP 197102031997031002

Gambar 2.2.

RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Kode SS/IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d. Q3	Q4	Y
I	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	89	89	89	89	89
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	95	95
II	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,65 (skala 5)	4,65 (skala 5)	-	4,65 (skala 5)	-	4,65 (skala 5)
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel							
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
IV	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	21%	46%	46%	76%	76%	100%	100%
4b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	88,5	88,5	-	88,5	88,5	88,5
4c-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	50%	65%	65%	80%	80%	90%	90%
V	Pengelolaan kas yang optimal							
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)
VI	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien							
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	85	85	85	85	85	85	85
6b-N	Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	90	90	90	90	90	90

Kode SS/ IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
VII	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel							
7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%
VIII	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84,5	84,5
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	85	85
8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
IX	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	83	83
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
Bandung, 31 Januari 2022 PNS yang dinilai,  Jukika Sirait NIP 197102031997031002								

Gambar 2.3.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Kinerja Lainnya

**A. CAPAIAN
KINERJA
ORGANISASI**

Pengukur capaian kinerja KPPN Bogor tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Bogor adalah sebesar 105,7. Nilai Kinerja Organisasi tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

Perspective	Bobot	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir	Nilai	Nilai Akhir
		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021	
Stakeholder	25%	114,08	28,52	118,57	28,11	106,89	26,72	114,42	28,60	105,03	26,26
Customer	15%	109,71	16,58	101,77	15,87	106,18	15,95	108,26	16,24	102,8	15,42
Internal Process	30%	101	31,68	100,85	32,25	100,02	31,56	98,86	30,85	106,91	32,07
Learning and Growth	30%	120	33	118,57	32,58	118,45	32,81	111	32,75	108,91	32,67
Nilai Kinerja Organisasi / NKO		109,78		108,81		107,05		108,45		106,42	

Perspective	Bobot	Nilai	Nilai Akhir
		Tahun 2022	
Stakeholder	30%	102,05	30,612
Customer	20%	101,72	20,34
Internal Process	25%	108,07	27,02
Learning and Growth	25%	110,88	27,72
Nilai Kinerja Organisasi / NKO		105,70	

Tabel 3.1

Selama tahun 2022, capaian IKU pada KPPN Bogor seluruhnya telah berstatus hijau, yang berarti semua indikator yaitu sebanyak 20 indikator kinerja utama telah memperoleh realisasi di atas target yang telah ditentukan sebesar 105,7. Namun demikian Nilai Kinerja Organisasi mengalami penurunan sebesar 4,08 dibandingkan dengan nilai tahun 2017

sebesar 109,78. Hal ini disebabkan karena adanya target IKU yang meningkat dan capaian IKU yang tidak optimal. Data target dan realisasi IKU telah diinput pada aplikasi INTENSE sehingga diperoleh Nilai Kinerja Organisasi s.d. Triwulan IV Tahun 2022 sebesar 105.7. Adapun realisasi capaian IKU tersebut dapat ditunjukkan pada tabel.3.2 di bawah ini:

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN Bogor
Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								102.05
1. Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel								102.05
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	89.10	Maximize	Proxy Low	19.00%	50.00%	100.11
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95.00	98.78	Maximize	Proxy Low	19.00%	50.00%	103.98
Customer (20.00)								101.72
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.72
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.65	4.73	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	101.72
Internal Process (25.00)								108.07
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.48
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40	99.88	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	100.48
4. Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								101.47
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.00
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90.00	92.07	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.30
4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88.50	90.40	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.14
5. Pengelolaan kas yang optimal								114.90
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83.00	91.14	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	109.80
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
6. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								112.83
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.26	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	110.29
6b-N	Indeks Implementasi Digipay	3.00	3.83	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	120.00
6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	90.00	95.04	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	105.60
7. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								110.65
7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.50	99.77	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	101.29

Learning and Growth (25.00)								110.88
8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								110.42
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.50	85.82	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	101.56
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85.00	95.91	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	112.84
8c-N	Nilai rata - rata hard competency pegawai	78.00	91.17	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	116.88
9. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal								111.33
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	99.33	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	104.01
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83.00	93.10	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	112.17
9c-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	116.07	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	116.07
NILAI KINERJA ORGANISASI								105.70

Tabel 3.2

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel.3.2 di atas bahwa pada tahun 2022 KPPN Bogor selain berhasil memperoleh realisasi capaian kinerja yang sangat baik yaitu dengan nilai sebesar 105,7

Definisi Sasaran Strategis, Definisi Indikator Kinerja Utama, Formula Perhitungan IKU serta Penjelasan Capaian IKU pada setiap sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut:

SS.1
Pengelolaan
Pengelolaan treasury
pemerintah yang
akuntabel

Pengelolaan treasury merupakan keseluruhan rangkaian aktivitas pengelolaan kas meliputi perencanaan kas, pengelolaan kas, dan pemanfaatan idle cash. Hal tersebut dilaksanakan secara aktif (active cash management) untuk menjamin ketersediaan kas dalam rangka membiayai belanja pemerintah.

Dalam rangka melakukan pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel, DJPb terus berupaya agar pengelolaan treasury dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, transparan, dan bertanggung jawab. Proses pengelolaan tersebut memiliki tujuan untuk dapat mendukung capaian opini yang baik atas pelaporan keuangan pemerintah pada tahun anggaran.

IKU 1a-CP Nilai kinerja
pelaksanaan anggaran
K/L

Dalam rangka memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran Satker, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja yang sekaligus dapat berperan sebagai katalis perubahan perilaku dan pola pikir Satker dalam pelaksanaan anggaran.

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara kuantitatif, yang dapat terwakili oleh aspek pelaksanaan anggaran meliputi:

- Aspek Kualitas Perencanaan, dengan indikator sebagai berikut:
 - Revisi DIPA
 - Deviasi Halaman III
- Aspek Kepatuhan Kualitas Pelaksanaan, dengan indikator:
 - Penyerapan anggaran
 - Belanja kontraktual
 - Penyelesaian tagihan

- d. UP dan TUP
 - e. Dispensasi
3. Aspek Kualitas Hasil, dengan indikator:
- a. Capaian output

Rincian variabel/indikator, tata cara dan bobot perhitungan untuk setiap aspek diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Formula IKU

Nilai IKPA pada Aplikasi OM-SPAN untuk K/L/Unit Eselon I/Satker diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai kinerja indikator dikalikan dengan bobot masing-masing indikator pada tingkat K/L/Unit Eselon I/Satker. Dalam hal pada salah satu atau beberapa indikator kinerja yang tidak memiliki transaksi, maka nilai akhir IKPA K/L/Unit Eselon I/Satker dihitung dengan mengalikan konversi bobot IKPA.

$$\text{Nilai IKPA} = \sum_{n=1}^{13} (\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{Konversi Bobot}^*)$$

*)Keterangan:

- a. Konversi bobot bernilai 100 persen apabila K/L/Unit Eselon I/Satker memiliki seluruh data transaksi atas indikator yang dinilai.
- b. Konversi bobot bernilai di bawah 100 persen apabila pada Satker tidak terdapat data transaksi untuk indikator tertentu.

Penjelasan detail indikator dan Tata cara perhitungan nilai IKPA diatur dalam ketentuan mengenai Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga yang ditetapkan oleh DJPb.

Hasil penilaian Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89,10	100,11%

Realisasi Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L adalah 89,1 mencapai 100,11% dari target yang ditetapkan sebesar 89.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Tentang Kebijakan dan Perubahan Implementasi IKPA, Rencana Penarikan Dana, SAKTI WEB dan Penggunaan, kemandirian serta pertanggungjawaban KKP

2. Sosialisasi Pengisian Data Capaian Output oleh Satker, Modul Pelaksanaan dan Pelaporan Aplikasi Sakti WEB, Evaluasi e-jafung, KKP dan penyampaian Dokumen Tagihan melalui e-SPM
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan input capaian output

Rencana Aksi

FGD, Sosialisasi dan Monev IKPA

*IKU 1b-N
Nilai Kualitas LK Kuasa
BUN KPPN*

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 218/PMK.05/2016 tanggal 30 Desember 2016, tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, KPPN selaku UAKBUN-Daerah melakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat UAKBUN-Daerah berupa Laporan Arus Kas, Neraca KUN, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca SAU.

KPPN menyusun laporan keuangan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 221/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Penyusunan Dan Penyampaian Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara.

Selanjutnya, KPPN menyusun laporan Keuangan dengan sistematika dan lampiran sesuai Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-6193/PB/2017 tanggal 17 Juli 2017 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kuasa BUN-Daerah dan Koordinator Kuasa BUN-Kanwil.

LK Kuasa BUN tingkat Daerah tersebut secara periodik disampaikan kepada Kanwil DJPb, Dit. PKN (selaku UAPBUN-AP) dan Dit. APK Ditjen Perbendaharaan.

Untuk mewujudkan kualitas penyusunan LK pada KPPN, Kanwil DJPb memberikan penilaian terhadap Kualitas LK dimaksud berdasarkan Nota Dinas Direktur APK Nomor ND-11/PB.6/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal Kriteria Penilaian Laporan Keuangan Tingkat UAKBUN-D KPPN dan Laporan Keuangan Tingkat UAKKBUN Kanwil Ditjen Perbendaharaan berdasarkan empat kriteria, yaitu: (1) akurasi data (70%); (2) ketepatan waktu (2%); kelengkapan (3%); dan (4) Tingkat Partisipasi (25%). Penilaian LK unaudited berkontribusi sebesar 70% dan audited sebesar 30%. Hasil penilaian tersebut dituangkan dalam Keputusan Kepala Kanwil DJPb.

Kategori kualitas nilai LK Kuasa BUN tingkat Daerah adalah sebagai berikut:

Level 4 = 95-100 (Sangat Baik)

Level 3 = 80-94 (Baik)

Level 2 = 65-79 (Cukup)

Level 1 = 0-64 (Kurang)

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report. Artinya, untuk realisasi IKU tahun 2021, merupakan hasil penilaian kualitas LK Kuasa BUN tingkat UAKBUN-D KPPN tahun 2020.

Formula IKU :

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
1b-N	Nilai Kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	98,78	103,98%

Realisasi Nilai LK Kuasa BUN KPPN yang berkualitas adalah 98,78 mencapai 103,98% dari target yang ditetapkan sebesar 95.

Tindakan yang telah dilaksanakan

4. Rekonsiliasi internal secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seksi lainnya.
5. Melakukan analisis laporan keuangan melalui kertas kerja analisis
6. Optimalisasi fungsi validasi data transaksi keuangan pada aplikasi e-Rekon&LK
7. Mengirim LK UAKBUN KPPN Bogor secara tepat waktu dan lengkap.

Rencana Aksi

1. Rekon internal
2. Analisis Laporan keuangan
3. Optimalisasi validasi
4. Penyampaian LKK BUN KPPN secara tepat waktu

*SS.2
Birokrasi dan
layanan publik
yang agile, efektif
dan efisien*

Sebagaimana undang undang tentang Pelayanan Publik, setiap institusi penyelenggara negara dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai peraturan atas barang/jasa/pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara negara.

Dalam rangka mendapatkan penyelenggara negara yang mampu melayani masyarakat dan mampu meletakkan pondasi yang diperlukan bangsa untuk memenangkan persaingan global, diperlukan birokrasi yang agile, efisien, dan efektif, yaitu yang fleksibel, lincah dan cepat dalam merespon perubahan, serta mampu menggunakan sumber daya yang tersedia dengan seminimal mungkin untuk mendapatkan target/output yang telah ditetapkan secara optimal.

*IKU.2a-N
Indeks Kepuasan
Satker terhadap
layanan KPPN*

Indeks kepuasan satker terhadap layanan adalah rata-rata tingkat kepuasan satker terhadap seluruh produk layanan perbendaharaan dari KPPN yang mereka gunakan dan manfaatkan, meliputi proses Pencairan Dana, layanan bimbingan dan konsultasi, konfirmasi surat setoran, penyelesaian rekonsiliasi realisasi anggaran, dan penyediaan sarana prasarana .

Indeks kepuasan satker diukur melalui survei oleh masing-masing KPPN dengan metode sampling kepada responden terpilih dari seluruh mitra kerja yang dilayani oleh masing-masing unit eselon IV KPPN.

Indeks Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut :

5 = Sangat Puas

4 = Puas

3 = Cukup Puas

2 = Kurang Puas

1 = Tidak Puas

Formula IKU :

Indeks hasil survei kepuasan satker

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65	4,73	101,72

Realisasi Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN pada tahun 2022 sebesar 4,73 mencapai 101,72 % dari target sebesar 4,65.

Isu utama

Indeks kepuasan terhadap layanan KPPN bisa menurun, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk meningkatkan kepuasan layanan kepada satuan kerja.

Permasalahan yang terjadi

Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN telah mencapai target, namun masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu ;

- a. Adanya perubahan dan aplikasi baru yang belum sempurna
- b. Adanya perubahan petugas pengantar SPM yang kurang memahami proses bisnis di KPPN.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Memberikan dan meningkatkan layanan secara menyeluruh kepada Satuan Kerja meliputi layanan CSO di Seksi MSKI, Layanan Rekonsiliasi di Vera, Layanan Konfirmasi di Seksi Bank, Proses Pencairan dana di Seksi Pencairan Dana dan memenuhi sarana dan prasarana oleh Seksi Sub Bagian Umum
2. Meningkatkan pemahaman pegawai KPPN Bogor melalui GKM yang diselenggarakan secara rutin setiap harinya.
3. Membuka layanan pada saat jam istirahat.
4. Optimalisasi peran pejabat fungsional KPPN Bogor dalam menyampaikan edukasi mengenai perbendaharaan kepada Satuan Kerja.

Rencana Aksi :

Melaksanakan FGD, Sosialisasi, Rapat Terbatas dengan *stakeholders* baik secara online maupun secara offline

SS.3 Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel

- Regulasi adalah peraturan yang disusun sebagai dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- Otorisasi adalah segala ketetapan yang dibuat oleh DJPb dan unit kerja di bawahnya dalam rangka pengelolaan perbendaharaan.
- Kredibel adalah dapat dipercaya yang mengandung maksud bahwa kebijakan bidang pengelolaan perbendaharaan merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel mengandung makna bahwa perumusan peraturan yang menjadi dasar dan arah dalam pengelolaan perbendaharaan serta segala ketetapan yang dihasilkan untuk mencapai tujuan sudah sesuai untuk menghasilkan output/outcome yang diharapkan serta merupakan kebijakan yang sistematis, efisien, efektif dan akuntabel.

IKU 3a-N. Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu

SPM Satker yang diproses menjadi SP2D merupakan mekanisme pengujian oleh KPPN yang bersifat formal dan substantif terhadap Surat Perintah Membayar (SPM) yang diajukan oleh Satuan Kerja untuk diterbitkan menjadi SP2D. Penyelesaian SP2D dinyatakan tepat waktu bila memenuhi janji layanan sebagaimana surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7283/PB.1/2018.

SPM satker yang diproses menjadi SP2D secara tepat waktu diukur berdasarkan jumlah penyelesaian SPM Satker yang diproses oleh Front Office Seksi Pencairan Dana dan diteruskan ke Middle Office Seksi Pencairan Dana untuk selanjutnya diterbitkan SP2D atau approval oleh Seksi Bank.

SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan dalam waktu 1 (satu) jam, dengan prasyarat kondisi sebagai berikut:

- a. Jenis SPM yang masuk adalah UP/GUP/TUP/PTUP dan LS Non Gaji
- b. ADK SPM masuk ke SPAN pada pukul 08.00 sampai dengan pukul 12.00 waktu setempat.
- c. Tidak di saat load pekerjaan KPPN sedang tinggi, sebagai contoh pada akhir tahun anggaran, pada saat pengajuan gaji 13, dan pada saat pengajuan pembayaran THR.
- d. Tidak termasuk SPM dengan penerima >100
- e. Data supplier, KONtrak, dan/atau RPD sudah masuk dalam SPM
- f. Tidak dalam keadaan force majeure

Formula IKU :

$$\frac{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan tepat waktu oleh KPPN}}{\sum \text{SP2D sesuai kriteria yang diterbitkan oleh KPPN}} \times 100\%$$

Ket : Kriteria SP2D sebagaimana prasyarat kondisi yang disebutkan pada Definisi IKU

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,88%	100,48

Realisasi Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 99,88% mencapai 100,48 dari target sebesar 99,4.

Isu utama

1. Pada triwulan I, masih terdapat SPM yang diproses menjadi SP2D diselesaikan melebihi waktu 1 (satu) jam.
2. Pada Triwulan II, telah dilakukan mitigasi permasalahan yang terjadi pada triwulan I sehingga target dapat dipenuhi.
3. Pada Triwulan III, telah dilakukan mitigasi permasalahan yang terjadi pada triwulan I sehingga target dapat dipenuhi.
4. Pada Triwulan IV, telah dilakukan mitigasi permasalahan yang terjadi pada triwulan I sehingga target dapat dipenuhi.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Kepala seksi Pencairan Dana selalu mensosialisasikan aturan-aturan baru dan mengawasi secara intensif kinerja pelaksana khususnya petugas FO konversi agar melakukan pengecekan secara menyeluruh atas pengajuan SPM oleh Satuan Kerja sehingga diharapkan SPM yang ditolak secara formal maupun substantif dapat diminimalisir.
2. Kepala Seksi Pencairan Dana secara rutin memberikan pengarahan terhadap petugas Front Office dan Midle Office untuk selalu berkomitmen dalam pencapaian penyelesaian tagihan secara tepat waktu.
3. Meningkatkan koordinasi antara petugas validasi dan reviewer.
4. Menghimbau Satker agar selalu melakukan cek data supplier melalui aplikasi cek supplier sebelum mengajukan ke petugas konversi

SS.4
Komunikasi,
edukasi dan
standardisasi yang
berkesinambungan

Komunikasi dan edukasi merupakan upaya untuk meningkatkan pemahaman stakeholders atas peraturan dan kebijakan di bidang perbendaharaan untuk memperkuat implementasi peraturan dan kebijakan dalam rangka mendorong tercapainya tujuan organisasi.

Dalam rangka memenuhi tuntutan perkembangan tata kelola keuangan yang bersifat dinamis, dibutuhkan strategi komunikasi dan edukasi yang kontinu, tidak tambal sulam serta berorientasi pada usaha membuat satker mampu menguasai secara menyeluruh aspek filosofi sampai dengan aspek teknis pengelolaan perbendaharaan.

IKU 4a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI

IKU ini mengukur tingkat pemenuhan implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2022 oleh satuan kerja-satuan kerja lingkup Kementerian/Lembaga, yang ruang lingkupnya ditetapkan melalui peraturan/keputusan Menteri Keuangan, dengan menggunakan sumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur, dan teknologi SAKTI.

Pengukuran tingkat pemenuhan implementasi SAKTI tahun 2022, dilakukan melalui kriteria sebagai berikut :

A. Pencapaian atas pelaksanaan porsi tahapan kegiatan yang telah ditetapkan secara tepat waktu (sesuai target dalam Tabel A)

Tabel A. Tahapan Kegiatan Implementasi SAKTI Tahun 2022						
Periode	No	Kegiatan Utama	Target Waktu Pelaksanaan			Bobot (% Tertim bang)
			Mulai	Selesai	Durasi (hari)	
	A	B	C	D	E	F
	1	Pendampingan transaksi awal tahun 2022 SAKTI	01-Jan-22	31-Mar-22	89	10%
	2	Pendaftaran/pemutakhiran user (trainer dan end user) SAKTI	01-Jan-22	31-Mar-22	89	6%
	3	Sosialisasi SAKTI	01-Jan-22	31-Mar-22	89	5%
	4	Monitoring penyelesaian perbaikan data aset tidak normal dan persediaan bersaldo minus	01-Apr-22	30-Jun-22	90	6%
	5	End User Training (EUT) SAKTI 2022	01-Apr-22	30-Jun-22	90	15%
	6	Publikasi SAKTI Tahap I	01-Apr-22	30-Jun-22	90	4%
	7	Monev implementasi SAKTI Semester I	01-Jul-22	30-Sep-22	91	10%
	8	Pendampingan migrasi saldo awal	01-Jul-22	30-Sep-22	91	10%
	9	Pendampingan penyusunan Laporan Keuangan (LK) Semester I	01-Jul-22	30-Sep-22	91	10%
	10	Publikasi SAKTI Tahap II	01-Oct-22	31-Dec-22	91	4%
	11	Pendampingan penyusunan LK Triwulan III	01-Oct-22	31-Dec-22	91	10%
	12	Pendampingan transaksi akhir Tahun 2022	01-Oct-22	31-Dec-22	91	10%
				Total	1.083	100%

Formula IKU

Jumlah Satker/User yang mengikuti tahapan					x Bobot Tahapan x 100%		
Jumlah Satker/User yang memenuhi kriteria tahapan							

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%	100%	100

Realisasi Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI pada tahun 2022 sebesar 100% dari target sebesar 100%.

Isu utama

KPPN Bogor berupaya untuk memenuhi setiap tahapan Implementasi SAKTI s.d. triwulan IV tahun 2022

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Pendampingan aplikasi Sakti Web
2. Melakukan pendaftaran/pemutakhiran user SAKTI
3. Sosialisasi aplikasi Sakti
4. Bimtek aplikasi SAKTI
5. Pendampingan migrasi SAKTI

Rencana aksi

1. Pendampingan pembuatan SPM KP Satker KPP
2. Sosialisasi kepada seluruh Satker
3. Bimtek dan Pendampingan Satker pengguna aplikasi SAKTI
4. Penyediaan Akses Point SAKTI
5. Mengoptimalkan Trainer SAKTI
6. Penyampaian Informasi secara aktif melalui sarana Media social/WAG

*IKU 4b-N
Persentase tingkat
implementasi
standardisasi
kompetensi pejabat
perbendaharaan*

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.

Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh pengguna anggaran/KPA untuk melakukan pengujian atas permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

PPK/PPSPM Tersertifikasi adalah PPK/PPSPM termasuk calon PPK/PPSPM yang lulus penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM melalui mekanisme konversi, uji kompetensi atau refreshment.

Penilaian kompetensi bagi PPK/PPSPM adalah rangkaian proses penilaian secara objektif untuk menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui ujian atau pengakuan atas kepemilikan sertifikat pelatihan/keahlian sesuai PMK Nomor 211/PMK.05/2019 tentang Tata Cara Penilaian Kompetensi bagi PPK dan PPSPM pada Satuan Kerja Pengelola APBN

Tingkat implementasi diukur berdasarkan tahapan pelaksanaan penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada Satuan Kerja wilayah pembayaran masing-masing KPPN, yang meliputi:

- Pendaftaran Admin Satker SIMASPATEN
- Pendaftaran user peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM pada SIMASPATEN
- Verifikasi yang dilakukan oleh KPPN terhadap berkas usulan yang diajukan peserta penilaian kompetensi PPK/PPSPM melalui SIMASPATEN; dan
- Sertifikat PNT/SNT yang diterbitkan untuk peserta yang telah memenuhi dengan status pada SIMASPATEN adalah Konversi dan Konversi Refreshment.

Formula IKU :

Realisasi IKU =

$$\frac{(\text{persentase pendaftaran Admin Satker} \times \text{bobot}) + (\text{persentase pendaftaran user peserta} \times \text{bobot}) + (\text{persentase verifikasi usulan} \times \text{bobot}) + (\text{persentase sertifikat PNT/SNT} \times \text{bobot})}{\text{Total Bobot}}$$

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
4b-N	Persentase tingkat imlementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90	92,07	102,30

Realisasi Persentase tingkat imlementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan pada tahun 2022 sebesar 92,07 dari target sebesar 90 mencapai 102,3.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menyampaikan informasi terkini terkait dengan Pejabat perbendaharaan yang belum bersertifikat.
2. Melakukan koordinasi dan komunikasi secara lebih intensif kepada Satuan kerja.

IKU 4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan

Tingkat pemahaman stakeholders merupakan tingkat daya tangkap peserta (stakeholders) terhadap segala materi yang diberikan pada pelatihan teknis (bimtek atau yang dipersamakan dengan itu). Tolok ukur hasil pelatihan teknis didasarkan pada

peningkatan pemahaman peserta atas materi yang diberikan dalam pelatihan untuk satu periode. Ruang lingkup pelatihan teknis meliputi semua kegiatan pembinaan yang diselenggarakan oleh KPPN.

Untuk bimtek diukur dengan post test sedangkan untuk sosialisasi diukur dengan kuesioner. Jika pada satu periode pelaporan (satu triwulan) terdapat kegiatan bimtek dan kegiatan sosialisasi, maka total nilai efektivitas edukasi dan komunikasi pada triwulan tersebut dibobot sebagai berikut: hasil post test 60% sedangkan hasil kuesioner 40%.

Formula IKU :

Rata-rata Indeks Tingkat Efektifitas Edukasi dan Komunikasi

$0 < x \leq 20$ = tidak efektif
 $20 < x \leq 40$ = kurang efektif
 $40 < x \leq 60$ = cukup efektif
 $60 < x \leq 80$ = efektif
 $80 < x \leq 100$ = sangat efektif

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5	90,40	102,14

Realisasi Indeks efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2022 sebesar 90,40 dari target sebesar 88,5 mencapai 102,14

Isu Utama :

Target yang telah ditetapkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :

Kondisi Covid-19, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara hybrid (offline dan online)

Peserta yang hadir sebagian besar berbeda dengan yang dimaksud pada undangan

Implikasi :

Pemahaman peserta dalam memahami materi Bimtek dan sosialisasi masih kurang. Pemahaman peserta dalam memahami materi Bimtek dan sosialisasi masih kurang.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Selalu memberikan Bimtek dan Sosialisasi kepada Satuan Kerja dengan cara yang mudah dipahami oleh Satuan Kerja dan selalu memberikan waktu kepada Satuan Kerja untuk menyampaikan permasalahan atau materi yang belum dipahami.
2. Melakukan edukasi melalui sarana grup whatsapp

3. Menghimbau kepada satuan kerja agar dalam penugasan terkait undangan KPPN disesuaikan dengan kompetensi yang dipersyaratkan

SS.5
Pengelolaan kas yang optimal

Sesuai dengan ketentuan UU No.1 tahun 2004, salah satu fungsi Perbendaharaan negara adalah melaksanakan pengelolaan kas. Pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas yang efektif dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden.

Optimal memiliki arti bahwa pengelolaan kas ditujukan untuk mewujudkan asas efektif dan efisien serta memperoleh kemanfaatan sebesar-besarnya atas kas negara. Pengelolaan kas yang optimal dapat direpresentasikan dari akurasi antara perencanaan dan realisasi APBN dengan memenuhi seluruh target output/outcome yang telah direncanakan.

IKU 5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas

Perencanaan Kas (Renkas) KPPN adan Rencana Penarikan Dana (RPD) dan/atau Perkiraan Pendapatan bulanan, RPD harian, dan Perkiraan Pendapatan mingguan tingkat Satker serta pemutakhirannya yang disampaikan kepada Kepala KPPN oleh KPA.

Perencanaan Kas KPPN dinyatakan akurat apabila realisasi deviasi Rencana Penarikan Dana satker dan Perkiraan Pencairan Dana Harian (PPDH) berada dalam batas kewajaran sebagaimana ditentukan dalam target IKU.

Pemberian dispensasi RPD, baik nilai maupun waktu, tetap diperhitungkan dalam formulasi akurasi RPD

satker.

PPDH adalah Perkiraan Pencairan Dana Harian, yang menjadi pagu pencairan tertinggi KPPN dalam satu hari.

Persentase perencanaan penarikan dana satker yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi seluruh satker pada periode tertentu.

Formula IKU :

100% - (Rata - Rata Deviasi RPD harian KPPN per periode)

Keterangan :

Tingkat deviasi RPD diperoleh dari Laporan Deviasi dari Modul Renkas pada Aplikasi OMSPAN untuk kemudian disesuaikan dengan penyesuaian deviasi RPD. Penyesuaian deviasi adalah:

- a) Pemberian dispensasi RPD atas pengajuan SPM, deviasinya dihitung 0%.
- b) Penyesuaian RPD satker BA BUN yang tidak terealisasi SPM-nya.
- c) Penyesuaian RPD atas SPM-KP yang SPM-nya melebihi batas waktu update RPD Harian (4 hari kerja).
- d) Penghapusan deviasi pada RPD harian akibat satker tidak mengajukan SPM sesuai RPD harian yang telah disampaikan.

- e) Penghapusan deviasi pada beberapa RPD Harian yang nilainya sama di beberapa tanggal yang berurutan, tapi satker hanya mengajukan 1 SPM
- f) Sepanjang belum ada update aplikasi terkait RPD Harian (a.l. SAKTI / SAS / Konversi), deviasi atas pengajuan SPM dengan nilai 1 miliar rupiah sampai dengan 4,9 miliar rupiah dihitung 0%.

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83%	91,14%	109,8

Realisasi Persentase akurasi perencanaan kas KPPN adalah 91,14 mencapai 109,8 dari target yang ditetapkan sebesar 83.

Isu Utama

Target yang telah ditetapkan dapat dicapai, namun demikian masih terdapat hal-hal yang perlu mendapat perhatian dengan melakukan koordinasi dan komunikasi untuk Satker SAKTI yang lebih intensif

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Telah ditetapkan Rencana Kerja untuk melaksanakan sosialisasi kepada seluruh satker dan FGD terkait RPD khusus untuk satker pengguna SAKTI
2. Menerbitkan surat teguran kepada Satuan kerja yang tidak akurat menyampaikan RPD
3. Koordinasi internal Seksi MSKI dan Seksi Pencairan Dana serta dengan Seksi Bank (khusus RPD satker pengguna SAKTI) untuk selalu memantau RPD yang diajukan Satuan Kerja

*IKU.5b-N
Indeks efektivitas
pengelolaan
pengeluaran kas*

Efektivitas pengeluaran kas KPPN diukur berdasarkan penyaluran dana yang akurat dan kecepatan penyelesaian retur SP2D yang diterbitkan KPPN.

Penyaluran dana SP2D yang akurat adalah penyaluran dana SP2D kepada para penerima yang tidak di-retur oleh Bank Operasional.

Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian pemindahbukuan dan/transfer pencairan dana APBN dari Bank penerima kepada Bank Operasional karena nama, alamat, nomor rekening, dan/atau nama bank yang dituju tidak sesuai dengan data rekening Bank penerima atau rekening penerima tidak aktif.

Kecepatan Penyelesaian Retur yang dilakukan oleh seluruh KPPN di Indonesia untuk meningkatkan pengelolaan pengeluaran APBN dalam rangka meningkatkan pelayanan dengan tepat waktu, tepat jumlah, serta tepat sasaran kepada satuan kerja/stakeholder .

Formula IKU :

$$(70\% \times \text{nilai indeks A}) + (30\% \times \text{nilai indeks B})$$

Keterangan

A = Penyaluran dana SP2D yang akurat, yang dihitung dengan formula:	
$\frac{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan} - \sum \text{penerima pada SP2D yang diretur oleh BO}}{\sum \text{penerima pada SP2D yang diterbitkan}} \times 100\%$	
A. Indeksasi Penyaluran dana SP2D yang akurat: - Indeks 4 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 90% - 100% - Indeks 3 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 80% - 89% - Indeks 2 = Penyaluran dana SP2D yang akurat antara 70% - 79% - Indeks 1 = Penyaluran dana SP2D yang akurat di bawah 70%	
B = Kecepatan Penyelesaian Retur, dengan formula:	
$\frac{\{[n \text{ SP2D-P I1} \times 1] + [n \text{ SP2D-P I2} \times 2] + [n \text{ SP2D-P I3} \times 3] + [n \text{ SP2D-P I4} \times 4]\}}{\sum n \text{ SP2D-P}}$	
Keterangan: n SP2D-P I1 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 1 n SP2D-P I2 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 2 n SP2D-P I3 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 3 n SP2D-P I4 = jumlah SP2D Pengganti dengan kategori indeks 4 $\sum n \text{ SP2D-P}$ = total jumlah SP2D Pengganti	
Indeks kecepatan penyelesaian retur SP2D: Indeks 4 = SP2D Pengganti diterbitkan 1 s.d. 10 hari kerja sejak notifikasi retur di OMSPAN Indeks 3 = SP2D Pengganti diterbitkan 11 s.d. 15 hari kerja sejak notifikasi retur di OMSPAN Indeks 2 = SP2D Pengganti diterbitkan 16 s.d. 20 hari kerja sejak notifikasi di OMSPAN Indeks 1 = SP2D Pengganti diterbitkan lebih dari 20 hari kerja sejak notifikasi di OMSPAN	

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4	120

Realisasi Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas pada tahun 2021 sebesar 4 mencapai 120 % dari target sebesar 3.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Selalu mengingatkan Satuan kerja untuk memastikan data supplier itu sudah benar, aktif dan sesuai dengan data yang tercantum dalam data Bank penerima.

Rencana Aksi :

Melaksanakan GKM dan melaksanakan stakeholder day

SS.6 Pelaksanaan Anggaran yang efektif dan efisien

Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien adalah Kemampuan BUN untuk mengawal pelaksanaan kebijakan pelaksanaan anggaran berjalan secara efektif dan efisien dengan memastikan kegiatan pelaksanaan anggaran pada BA Kementerian Negara/Lembaga maupun BA BUN berjalan sesuai dengan ketentuan/kebijakan Pelaksanaan Anggaran.

IKU 6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Dalam rangka memastikan pelaksanaan anggaran penyaluran DAK fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa berjalan dengan efisien dan efektif, diperlukan suatu alat penilaian kualitas/kinerja seluruh stakeholder dalam pelaksanaan anggaran penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang menjadi kewenangan Ditjen Perbendaharaan.

Nilai Kualitas Kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa pada KPPN diukur dengan menggunakan beberapa variabel sebagai berikut :

1. Ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan oleh pemda. (SYARAT)
2. Tingkat akurasi penyusunan proyeksi penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (PROYEKSI)
3. Ketepatan waktu penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK dan Dana Desa oleh KPPN. (SPPSPM)
4. Ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK dan Dana Desa. (MONEV)
5. Kelengkapan dan Ketepatan waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN DAK dan Dana Desa. (LK-UAKPA)
6. Persentase Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa. (SALUR).

Formula IKU :

$$NKP \text{ TKDD} = [0,10 (\text{SYARAT}) + (0,20 (\text{PROYEKSI}) + 0,30 (\text{SPPSPM}) + 0,10 (\text{MONEV}) + 0,20 (\text{LK-UAKPA}) + 0,10 (\text{SALUR}^*)] \times 100$$

*) Indikator salur hanya diperhitungkan untuk evaluasi capaian IKU di Triwulan II dan IV sementara capaian IKU pada triwulan I dan III menggunakan 5 Indikator dengan penyesuaian bobot tertimbang.

Keterangan :

NKP TKDD adalah nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa) pada KPPN

SYARAT adalah rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian (dhi. pengajuan permintaan penyaluran melalui aplikasi OMSPAN) dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik oleh pemda per subbidang dengan mengacu pada ketentuan mengenai petunjuk teknis penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik pada Ditjen Perbendaharaan.

Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa dan DAK Fisik per subbidang per tahap penyaluran (Nilai Ketepatan Waktu Pengajuan Permintaan Penyaluran) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:

100 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap paling lambat 60 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

97 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 30 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

95 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang 15 hr kalender sebelum batas waktu yang ditentukan.

93 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap kurang dari 7 hari kalender batas waktu yang ditentukan.

90 = dokumen persyaratan disampaikan/diunggah secara benar & lengkap 7 hari kalender sampai dengan batas waktu yang ditentukan.

75 = dokumen persyaratan terlambat disampaikan/diunggah (apabila terdapat dispensasi)

SYARAT = Rata-rata nilai ketepatan waktu penyampaian = $\sum \text{NKPWPDP DFDD} / \text{Jumlah penyaluran DFDD per tahap penyaluran yang siap disalurkan}$.

Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SYARAT" bersifat data kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data dari awal tahun hingga periode triwulan berkenaan, bukan hanya data pada triwulan terkait.

Dalam hal dalam periode tertentu tidak terdapat transaksi/aktivitas penyampaian dokumen persyaratan maka nilai indikator syarat diberikan sebesar target.

PROYEKSI Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai pengelolaan DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa; KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menyampaikan Proyeksi melalui Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa serta pemutakhirannya kepada Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa secara otomatis pada Aplikasi SAKTI. RPD bulanan pada Aplikasi Sakti disusun dengan memperhatikan tahapan, persentase, nilai, periode dan kesiapan Pemda dalam menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran. KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa berkoordinasi dengan Pemda untuk mendapatkan informasi terkait kesiapan Pemda dalam memenuhi dokumen persyaratan penyaluran.

Proyeksi dinyatakan akurat apabila deviasi antara rencana penarikan dana dengan realisasinya maksimal 15%. Persentase proyeksi yang akurat adalah selisih antara akurasi maksimal (100%) dengan rata - rata tingkat deviasi proyeksi penyaluran pada periode tertentu. Periode data proyeksi KPA Penyaluran DAK dan Dana Desa adalah setiap 5 Hari Kerja sebelum bulan berkenaan berakhir dengan menggunakan aplikasi SAKTI.

% Akurasi = $100\% - (\text{Rata - Rata Deviasi Proyeksi Penyaluran DAKDD per periode})$

Tingkat deviasi proyeksi diperoleh dari:

$$\times 100\%$$

Penentuan nilai indeks proyeksi penyaluran DAKDD dihitung dengan ketentuan sistem layering deviasi sebagai berikut:

100 = deviasi per periode sampai dengan 15%;

95 = deviasi per periode di atas 15% sampai dengan 20%;

90 = deviasi per periode di atas 20% sampai dengan 25%;

75 = deviasi per periode di atas 25%

SPPSPM	adalah indeks ketepatan waktu penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran, dengan kriteria sebagai berikut: a. penyelesaian SPP dan SPM penyaluran dana transfer DAK Fisik dan Dana Desa oleh KPPN selaku KPA Penyaluran dilakukan paling lambat 5 HK setelah dokumen persyaratan telah diterima oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan lengkap dan benar (bobot 0,8) b. Ketepatan waktu penyelesaian retur SP2D penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa berdasarkan PER-9/PB/2018 tanggal 28 Juni 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) (bobot 0,2) $SPPSPM = ((\text{Jumlah tagihan DAKDD yang diselesaikan proses pembayarannya tepat waktu} / \text{jumlah seluruh tagihan DAKDD yang diproses KPPN}) \times 0,8) + ((\text{Jumlah retur yang diselesaikan tepat waktu} / \text{jumlah total retur}) \times 0,2)$ Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "SPPSPM" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya.
MONEV	adalah nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang disampaikan secara triwulanan oleh KPPN kepada Kanwil dan ditembuskan kepada Koordinator KPA Penyaluran sesuai ketentuan SE 72/PB/2017 tentang Petunjuk teknis pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan dan/atau Nota Dinas yang diterbitkan oleh Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Sesuai ketentuan tersebut, Laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa oleh KPA Penyaluran disampaikan kepada Kanwil DJPb dan Koordinator KPA Penyaluran melalui Nadine dan portal http://10.242.231.124 paling lambat 5 HK setelah periode triwulanan berakhir dan/atau sesuai dengan Nota Dinas Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Penentuan nilai ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan dan evaluasi penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa oleh KPPN dihitung dengan ketentuan sebagai berikut: 100 = dokumen laporan monev disampaikan 5-4 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan. 95 = dokumen laporan monev disampaikan 3-1 Hari kerja sebelum batas waktu yang ditentukan. 90 = dokumen laporan monev disampaikan tepat pada batas waktu yang ditentukan. 65 = dokumen laporan monev disampaikan terlambat sesudah batas waktu yang ditentukan. 0,00 = dokumen laporan monev tidak disampaikan sampai dengan akhir triwulan penilaian. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "MONEV" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka digunakan data pada triwulan berkenaan saja tanpa memperhitungkan data triwulan sebelumnya dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report).
LK-UAKPA	adalah Nilai kelengkapan, pengungkapan laporan keuangan yang memadai dan ketepatan waktu penyampaian LK BUN tingkat UAKPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.05/2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK 221/PMK.05/2016 serta PMK 83/PMK.05/2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, dinyatakan bahwa batas waktu penyampaian LK tingkat UAKPA BUN adalah sebagai berikut: a. LK Bulanan berupa LRA dan Neraca disampaikan paling lambat tanggal 13 bulan berikutnya. b. LK Semester I disampaikan paling lambat tanggal 15 Juli TA berjalan. c. LK Triwulan III disampaikan pada bulan 15 Oktober TA berjalan e. LK Tahunan yang telah diaudit disampaikan paling lambat tanggal 23 April TA berikutnya. $LK-UAKPA = ((\text{nilai ketepatan waktu} \times 0,1) + (\text{nilai kelengkapan dan pengungkapan laporan keuangan yang memadai} \times 0,9))$ LK tingkat UAKPA BUN disampaikan kepada UAKKPA melalui Nadine dan Portal http://10.242.231.124/ sesuai ketentuan batas waktu yang ditentukan di atas atau ditentukan lain oleh surat Dirjen Perbendaharaan/ Direktur APK. Data yang digunakan dalam perhitungan nilai indikator "LK-UAKPA" bersifat tidak kumulatif, artinya untuk menghitung nilai indikator pada suatu periode triwulan, maka hanya digunakan data pada periode triwulan berkenaan dengan basis periode penyampaian laporan bukan periode laporan (historical report). Dalam kondisi normal, batas waktu mengacu pada PMK 221/PMK.05/2016 dan kelengkapan mengacu pada PMK 83/PMK.05/2018. Namun dalam kondisi tertentu batas waktu penyampaian LK dapat juga diatur dengan Nota Dinas/Surat yang diterbitkan Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

SALUR adalah Nilai persentase penyaluran DAK Fisik, DAK Nonfisik, dan Dana Desa dengan target capaian ditentukan setiap semester. Indikator "SALUR" bertujuan untuk melihat efektivitas pengelolaan penyaluran TKDD oleh KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
 $SALUR = \frac{Jumlah\ (Penyaluran\ TKDD/Pagu\ Alokasi\ TKDD) \times 100\%}{Jenis\ TKDD}$
 Perhitungan nilai % penyaluran dilakukan tiap semester dengan jenis konsolidasi periode Take Last Known, dengan rincian nilai target sebagai berikut:
 Semester I:
 DAK Fisik = 10%
 Dana Desa = 55%
 DAK Nonfisik = 40%
 Semester II:
 DAK Fisik = 90%
 Dana Desa = 98%
 DAK Nonfisik = 95%
 Dalam hal nilai realisasi penyaluran TKDD lebih dari target yang ditetapkan maka tetap diberikan nilai maksimal (100). Sebaliknya apabila kurang diberikan nilai sebesar rasio antara capaian realisasi dengan target pada periode penilaian.

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana transfer ke Daerah dan Dana Desa	90	99,26	110,29

Realisasi Nilai kinerja penyaluran DAK dan Dana Desa pada tahun 2022 sebesar 99,26 Realisasi tersebut mencapai 110,29 dari target sebesar 90.

Isu utama

Capaian IKU telah melebihi target yang telah ditetapkan, namun demikian masih ada yang perlu ditingkatkan terkait ketepatan waktu penyampaian dokumen persyaratan DAK Fisik dan Dana Desa serta penyelesaian SPM/SP2D atas penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

Implikasi :

Capaian kinerja masih dapat ditingkatkan dengan menyampaikan langkah-langkah penyampaian informasi kepada Kab Bogor, Kota Bogor, dan Kota Depok.

Akar permasalahan :

Penyampaian dokumen syarat penyaluran DAK Fisik beberapa bidang oleh Pemda dilaksanakan pada batas akhir penyampaian dokumen persyaratan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyaluran Dana Desa Tahun 2022
2. Rapat koordinasi dan sosialisasi persiapan penyaluran DAK Fisik dan dana Desa

Implementasi Digipay diukur dari progres capaian implementasi Digipay dalam rangka penggunaan Uang Persediaan yang bersumber dari Rupiah Murni dan/atau PNBP. Pelaksanaan Digipay diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor

Per-20/PB/2019 dan aturan/kebijakan teknis yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara, antara lain Surat Direktur PKN Nomor ND-1209/PB.3/2021 tanggal 30 Juli 2021 dan ND-221/PB.3/2022 tanggal 10 Februari 2022. Capaian implementasi Digipay diukur dalam 3 parameter yaitu capaian jumlah satker, jumlah vendor, dan jumlah transaksi.

Formula :

$$\text{Indeks Implementasi Digipay} = \frac{\begin{matrix} \text{Indeks Capaian Satker} \\ + \\ \text{Indeks Capaian Transaksi} \\ + \\ \text{Indeks Capaian Vendor} \end{matrix}}{3}$$

Indeks Implementasi Digipay

- Indeks 4 (Sangat baik) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan $\geq 70\%$
- Indeks 3 (Baik) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan $50 \geq \text{sd} < 70$
- Indeks 2 (Cukup) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan $30 \geq \text{s.d} < 50$
- Indeks 1 (Kurang) jika persentase jumlah capaian vendor, transaksi, dan satker dibandingkan dengan target vendor, transaksi dan satker setiap triwulan $30 <$

Target Capaian :

- Satuan Kerja, Q1 = 5% ; Q2 = 10% ; Q3 = 10% ; Q4 = 5% , total 30% dari **jumlah satker mitra pengelola UP** pada Bank Himbara lingkup Kanwil DJPb/KPPN
- Vendor, Q1 = 5% ; Q2 = 10% ; Q3 = 10% ; Q4 = 5% , total 30% dari **jumlah satker yang bergabung** dalam Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN
- Transaksi, Q1 = 5% ; Q2 = 10% ; Q3 = 10% ; Q4 = 5% , total 30% dari **jumlah satker yang bergabung** dalam Digipay lingkup Kanwil DJPb/KPPN

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
6b-N	Indeks Implementasi Digipay	3	3,83	120

Realisasi Indeks Implementasi Digipay pada tahun 2022 sebesar 3,83 Realisasi tersebut mencapai 120 dari target sebesar 3.

Tindakan yang telah dilaksanakan

- Bimbingan teknis implementasi Digipay kepada Satuan kerja
- FGD implementasi Digipay

*IKU 6c-N
Tingkat Partisipasi
Pelaporan Data Capaian
Output Satker*

DIPA merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Satker yang di dalamnya memuat informasi kinerja yang hendak dicapai Satker dalam satu tahun anggaran. Informasi kinerja tersebut di antaranya berupa target Rincian Output (RO) yang mencantumkan target kuantitatif dari produk akhir berupa barang/jasa yang akan dihasilkan dari berbagai aktivitas belanja Satker. Untuk mendukung peran BUN dalam mengawal ketercapaian RO dan outcome belanja pemerintah, diperlukan mekanisme pelaporan dan pengumpulan data capaian output Satker. Proses pelaporan tersebut dilakukan melalui aplikasi OMSPAN yang dilaksanakan secara bulanan.

Formula IKU :

Metode penilaian tingkat partisipasi pelaporan data capaian output Satker pada Aplikasi OMSPAN adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output} = \frac{\text{Rata-Rata Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan dalam satu triwulan}}{\text{Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output}} \times 100$$

Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan = [(Jumlah Satker Yang Melaporkan data di open period reguler x 1,0) + (Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period tambahan x 0,5)] / Jumlah Satker yang Wajib Melaporkan Data Capaian Output.

Keterangan:

Tingkat Partisipasi Pelaporan Bulanan adalah Persentase yang menunjukkan tingkat kepatuhan seluruh Satker lingkup KPPN dalam melaporkan seluruh data capaian outputnya sesuai periode pelaporan ditentukan.

Jumlah Satker yang Melaporkan data di open period reguler adalah jumlah Satker yang telah melaporkan **seluruh data capaian output** OMSPAN pada *open period* reguler. *Open period* reguler adalah periode pelaporan secara otomatis oleh sistem (OMSPAN) mulai tanggal 1 s.d. 10 bulan berikutnya. 10 adalah hari libur, maka batas akhir pelaporan *open period* reguler adalah setelah tanggal 10 bulan berikutnya.

Jumlah Satker yang melaporkan data di open period tambahan. adalah jumlah Satker yang memiliki kewajiban untuk melaporkan **seluruh data capaian output** pada aplikasi OMSPAN pada periode tertentu. Satker yang memiliki kewajiban melaporkan data capaian outputnya adalah (1) Satker K/L dan Satker BUN pengelola DAK Fisik yang mengelola DIPA aktif pada periode/bulan tertentu, dan (2) Satker K/L dan Satker BUN pengelola DAK Fisik/Dana Desa pengguna aplikasi SAS atau SAKTI yang telah menandatangani komitmen (PPK) untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output satker	90	95,04	105,6

Realisasi Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output satker pada tahun 2022 sebesar 95,04. Realisasi tersebut mencapai 105,6 dari target sebesar 90.

Isu utama

Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output Satker pada Aplikasi OMSPAN masih perlu ditingkatkan.

Adanya perbedaan tanggal cut off input data capaian output dengan permintaan laporan capaian IKU.

Implikasi :

Capaian IKU tahun 2021 belum maksimal dan masih dapat ditingkatkan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan input data capaian output.

2. Penyampaian informasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja secara lebih rutin dan intensif.
3. Melakukan pendampingan Satker dalam pelaksanaan penginputan data capaian output

*SS.7
Pertanggungjawab
an keuangan
Negara yang
akuntabel*

Akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan laporan keuangan Pemerintah harus disusun secara profesional dan modern. Kualitas laporan keuangan Pemerintah dapat diidentifikasi dari ketepatan waktu penyelesaian Laporan Keuangan, penyelesaian rekomendasi atas audit pihak eksternal, serta opini atas yang baik dari BPK.

*IKU 7a-CP
Indeks kualitas
pelaksanaan
rekonsiliasi tingkat
UAKPA*

Kepatuhan satker dalam melakukan rekonsiliasi dan menjaga kualitas data laporan keuangan, diukur melalui aplikasi e-Rekon & LK, meliputi rekonsiliasi eksternal dan rekonsiliasi internal UAKPA.

Realisasi IKU dihitung berdasarkan :

Rekonsiliasi Internal :

Kesesuaian data BMN pada neraca Laporan Keuangan, dengan memastikan ketepatan data BMN yang dihasilkan oleh Aplikasi Persediaan / Modul Persediaan dan SIMAK BMN / Modul Aset Tetap dibandingkan dengan SAIBA / Modul GLP yang tercantum pada Monitoring Rekonsiliasi Internal di Aplikasi e-Rekon&LK/ Monsakti/ sejenisnya.

Nilai IKU diukur dari perbandingan jumlah satker yang tidak memiliki selisih rekonsiliasi internal tahun anggaran berjalan dengan jumlah seluruh satker.

Rekonsiliasi Eksternal :

1. Ketepatan waktu rekonsiliasi:

perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara tepat waktu dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

Ketepatan waktu rekonsiliasi yang dihitung berdasarkan jumlah satker yang melakukan upload data ke aplikasi E-Rekon&LK/monsakti/sejenisnya sebelum batas akhir yang ditetapkan

2. Keandalan rekonsiliasi:

Perbandingan jumlah satker yang melakukan rekonsiliasi laporan keuangan secara andal, dengan jumlah satker yang wajib melakukan rekonsiliasi laporan keuangan

Keandalan data dihitung berdasarkan jumlah satker yang tidak memiliki TDK (Transaksi Dalam Konfirmasi) belanja bruto dan TDK Kas di Bendahara Pengeluaran (ambang batas suspensi 0%) sesuai dengan BAR (Berita Acara Rekonsiliasi) yang paling akhir diterbitkan. Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat historical report.

Cakupan data setiap triwulan adalah sebagai berikut:

Tw 1 2022 = Des 2021 - Feb 2022

Tw 2 2022 = Mar - Mei 2022

Tw 3 2022 = Jun - Agt 2022

Tw 4 2022 = Sep - Nov 2022

Formula:				
Capaian IKU = (Indeks Rekonsiliasi Internal*50%) + (Indeks Rekonsiliasi Eksternal*50%)				
Rekonsiliasi Internal = Jumlah Satker yang tidak memiliki selisih rekonsiliasi internal tahun anggaran berjalan dibanding total keseluruhan satker dengan indeks sebagai berikut: Indeks 1 = < 40% Indeks 1,5 = 40% - 55% Indeks 2 = 56% - 65% Indeks 2,5 = 66% - 75% Indeks 3 = 76% - 85% Indeks 3,5 = 86% - 95% Indeks 4 = 96% - 100%				
Rekonsiliasi Eksternal = Jumlah Satker yang melakukan upload ADK rekonsiliasi secara tepat waktu sesuai batas waktu yang ditetapkan dibanding total keseluruhan satker dan Jumlah Satker yang terbebas dari TDK Belanja dan TDK Kas BP sesuai dengan BAR yang terakhir diterbitkan dibanding total keseluruhan satker dengan indeks sebagai berikut: Indeks 1 = < 93,50% Indeks 1,5 = 93,51% - 94,50% Indeks 2 = 94,51% - 95,50% Indeks 2,5 = 95,51% - 96,50% Indeks 3 = 96,51% - 97,50% Indeks 3,5 = 97,51% - 98,50% Indeks 4 = 98,51% - 100%				

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
7a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	4	120

Realisasi Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA pada tahun 2022 sebesar 4. Realisasi tersebut mencapai 120 dari target sebesar 3,25.

Isu utama

Nilai kinerja rekonsiliasi tingkat UAKPA secara tepat waktu dan andal telah tercapai pada triwulan I tahun 2022, namun masih diperlukan langkah-langkah peningkatan kinerja dan evaluasi pada periode berikutnya agar capaian tersebut dapat dipertahankan. Untuk triwulan II, berdasarkan Nota Dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-19/PB/PB.6/2022 hal Pelaksanaan Rekonsiliasi Eksternal dan Penyusunan Laporan Keuangan UAKBUN Daerah (KPPN) dan UAKKBUN Kanwil Periode Bulanan Tahun 2022 belum dapat dilaksanakan.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan monitoring pelaksanaan Rekonsiliasi dan TDK secara priodik
2. Menyusun laporan Monitoring Rekonsiliasi dan TDK secara periodik
3. Melakukan Bimtek dan pendampingan penyusunan Laporan Keuangan Satuan Kerja

4. Penyampaian informasi mengenai pelaksanaan rekonsiliasi kepada satuan kerja untuk tepat waktu dalam menyampaikan data rekonsiliasi melalui email dan WAG

*IKU 7b-N
Persentase LPJ
Bendahara yang andal
dan tepat waktu*

Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara oleh Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN yang menggunakan aplikasi pengelolaan rekening yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan c.q. DJPb.

Berdasar Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018, pengelolaan rekening tersebut menggunakan aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi) sejak 2018.

Sebagaimana ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN, penyampaian LPJ bendahara beserta lampirannya kepada KPPN dilaksanakan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah bulan yang bersangkutan berakhir.

LPJ Bendahara dinyatakan andal jika LPJ tersebut telah diverifikasi dan dinyatakan benar oleh Kuasa BUN KPPN sesuai indikator verifikasi LPJ yang telah ditetapkan.

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik penyusunan LPJ Bendahara yang bersifat historical report. Artinya, untuk data realisasi IKU triwulan I tahun 2022 merupakan rata-rata data bulan Desember 2021, bulan Januari dan Februari tahun 2022. Sedangkan realisasi IKU triwulan II 2022 merupakan rata-rata data pelaksanaan rekonsiliasi bulan Maret, April dan Mei tahun 2022. dst

Formula IKU :

$\sum$ LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	X 100 %
$\sum$ LPJ Bendahara yang seharusnya disampaikan ke KPPN	

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	99,77%	101,29

Realisasi Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu pada tahun 2022 sebesar 99,77%. Realisasi tersebut mencapai 101,29 dari target sebesar 98,5%

Isu utama

Capaian kinerja penyampaian LPJ pada triwulan I s.d. IV tahun 2022 melebihi target yang telah ditetapkan namun belum dapat dicapai secara optimal. Satker-satker mitra kerja KPPN Bogor masih ada yang belum mematuhi penyampaian LPJ sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.

Implikasi :

Pendampingan kepada satuan kerja atas pelaksanaan aplikasi SPRINT yang masih perlu ditingkatkan khususnya mengenai batas waktu penyampaian LPJ

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan sosialisasi terkait dengan LPJ yang dilaksanakan pada kegiatan pendampingan penyusunan LK Satuan Kerja
2. Mengingatkan Satuan Kerja untuk selalu tepat waktu dan benar dalam menyampaikan LPJ ke KPPN melalui email dan whatsapp.
3. Pendampingan kepada satuan kerja atas pelaksanaan Aplikasi SPRINT .

*SS.8
Penguatan tata
kelola dan budaya
kerja Kemenkeu
Satu dalam
ekosistem
kolaboratif*

Pemerintahan di masa depan akan dipengaruhi oleh tiga aspek, yaitu: work (proses bisnis), workforce (SDM), dan workplace (tempat bekerja). Dimana ketiga aspek tersebut akan sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan teknologi sebagai enabler. Untuk itu, diperlukan penguatan ketiga sumber daya tersebut secara terintegrasi melalui penguatan Budaya Kerja Kemenkeu Satu.

Kemenkeu Satu merupakan bentuk kolaborasi dari berbagai unsur dalam Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Setiap entitas dalam Kemenkeu memiliki tugas dan fungsinya masing-masing, namun dapat berkolaborasi dan bekerja bersama untuk akhirnya tumbuh dan berkembang bersama (kolaboratif).

*IKU.8a-N
Nilai kualitas
pengelolaan kinerja
berbasis strategy
focused organization*

Dalam rangka mendorong komitmen pimpinan dan seluruh pegawai terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di masing-masing unit lingkup DJPb, telah disampaikan matriks langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja dimaksud merupakan panduan bagi unit kerja lingkup DJPb untuk melaksanakan action plan yang implementatif berdasarkan prinsip-prinsip Strategy Focused Organization (SFO).

Sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya-upaya peningkatan kualitas pengelolaan kinerja di lingkungan DJPb, Kantor Pusat DJPb melaksanakan penilaian terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja di unit masing-masing.

Penilaian dimaksud dilaksanakan berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. Nilai kuantitatif pemenuhan unsur-unsur peningkatan kualitas pengelolaan kinerja periode sampai dengan triwulan III 2022.
- b. Nilai NKO Unit periode tahunan 2021.

Formula IKU :

Nilai hasil penilaian kualitas pengelolaan kinerja oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU	Target	Realisasi	Capaian
-----	--------	-----------	---------

8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,5	85,82	101,56
------	---	------	-------	--------

Realisasi Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization pada tahun 2022 sebesar 85,82. Realisasi tersebut mencapai 101,56 dari target sebesar 84,5.

Isu utama

Untuk capaian kinerja tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan, namun demikian masih perlu dilakukan peningkatan dalam pemenuhan dokumen pendukung langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja.

Tindakan yang telah dilaksanakan

Menyampaikan laporan langkah-langkah peningkatan kualitas kinerja secara tepat waktu dan pemenuhan dokumen pendukung sesuai dengan matriks yang telah ditetapkan. Mengirimkan laporan tersebut dengan menggunakan *email*, *drive* dan upload pada aplikasi intense secara tepat waktu.

*IKU.8b-N
Nilai hasil evaluasi
pelaksanaan tugas
kepatuhan internal*

Nilai hasil evaluasi merupakan hasil penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah DJPb, dan KPPN. Penilaian tersebut dilakukan oleh Sekretariat DJPb c.q. Bagian Kepatuhan Internal .

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-239/PB/2020 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Unsur-unsur penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada Kanwil DJPb, terdiri atas:

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%)
2. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, kode etik/disiplin pegawai, dan pengendalian gratifikasi (bobot: 55%)
3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 10%)

Formula IKU :

Hasil penilaian pelaksanaan tugas KI dari Kantor Wilayah DJPb

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	95,91	112,84

Realisasi Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal pada tahun 2022 sebesar 95,91 mencapai 112,84 dari target sebesar 85

Isu utama

Capaian kinerja dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Namun perlu di lengkapi dokumen pendukung khususnya rapat pembahasan intern.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Menyampaikan laporan kegiatan pemantauan pengendalian intern secara tepat waktu.
2. Memenuhi dokumen pendukung laporan dimaksud sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

*IKU.8c-N
Nilai rata-rata hard
competency pegawai*

IKU ini digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman para pegawai KPPN terhadap tugas dan fungsi yang mereka jalankan, sehingga outputnya dapat dijadikan sebagai pemetaan hard competency pegawai.

Teknisnya, para pegawai akan mendapat tes secara online yang terdiri dari beberapa soal untuk diselesaikan.

Untuk Kemenkeu-Three KPPN, realisasi IKU tersebut diukur berdasarkan rata-rata hasil tes yang dicapai oleh seluruh pegawai KPPN.

Dengan demikian, pimpinan unit dan atasan langsung agar memberikan bimbingan dan tutorial kepada para pegawai di lingkungan masing-masing.

Bagi para pegawai yang berkewajiban mengikuti tes hard competency namun berhalangan karena alasan tertentu, maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat eselon II masing-masing unit, dan capaian IKU pegawai bersangkutan adalah N/A (Not Available).

Namun jika tidak disertai surat keterangan, maka capaian IKU bagi pegawai bersangkutan adalah 0 (nol).

Pegawai yang tidak mengikuti tes, tidak dimasukkan dalam penghitungan capaian IKU atasan.

Formula IKU :

Jumlah nilai hasil tes hard competency yang diperoleh pegawai

Jumlah pegawai KPPN yang mengikuti tes hard competency

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78	91,17	116,88

Realisasi Nilai rata-rata *hard competency* pegawai pada tahun 2022 sebesar 91,17. Realisasi tersebut mencapai 116,88 dari target sebesar 78

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan GKM terkait dengan aplikasi dan peraturan secara reguler
2. Kegiatan One Day one Information setiap Senin s.d. Kamis
3. Pegawai diminta untuk mengembangkan kompetensi dengan melaksanakan belajar mandiri.
4. Pelaksanaan FGD Pengelolaan Keuangan Negara
5. Pelaksanaan WEBINAR, Pembelajaran jarak jauh, elearning

SS.9 Penguatan pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal

Pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada para stakeholder. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) harus dikelola secara efektif dan efisien, sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntabel) dalam rangka mencapai output yang diharapkan.

Pengelolaan BMN meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Optimalisasi pengelolaan BMN merupakan proses kerja dalam manajemen aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan potensi fisik, lokasi, nilai, jumlah/volume, legal dan ekonomis yang dimiliki aset tersebut.

IKU.9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA.

Perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" Kementerian Keuangan mengacu pada Surat Edaran Nomor 8/MK.1/2020 tanggal 23 Maret 2020 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kemenkeu.

Ruang lingkup perhitungan IKU "Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran" mencakup aspek kualitas serta aspek tata kelola dan administratif yang ada pada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Aspek kualitas didapat atas capaian

pada evaluasi kinerja anggaran pada SMART DJA. Aspek tata kelola dan administratif didapat atas capaian kualitas pelaksanaan anggaran pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran.

Formula IKU :

Formula:				
Perhitungan realisasi IKU =				
Capaian IKU PKPA Triwulan I		= Capaian IKPA Januari s.d. Maret		
Capaian IKU PKPA Triwulan II		= Capaian IKPA Januari s.d. Juni		
Capaian IKU PKPA Triwulan III		= Capaian IKPA Januari s.d. September*		
Capaian IKU PKPA Triwulan IV		= 40% Capaian IKPA Januari s.d. Desember + 60% Capaian SMART		

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,50%	99,33%	104,01

Realisasi Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN pada tahun 2022 sebesar 99,33% dari target sebesar 95,5%.

Isu Utama :

Penggunaan aplikasi IKPA dan SMART DJA dalam penilaian capaian IKU KPA sangat tergantung kedisiplinan, kepatuhan dan ketepatan penyampaian data masing-masing Indikator oleh Satuan Kerja.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melakukan koordinasi internal Evaluasi Pelaksanaan anggaran dengan pejabat pengadaan, urusan rumah tangga dan urusan keuangan untuk mengevaluasi kegiatan realisasi belanja yang berpotensi memberikan kontribusi negative pada capaian pelaksanaan anggaran
2. Telah menyusun surat keputusan Rencana Kerja/Kegiatan Tahun 2022 berikut rencana kebutuhan dana kegiatan
3. Menyusun uang persediaan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
4. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan
5. Memantau progress capaian pelaksanaan anggaran melalui aplikasi Monev PA
6. Melakukan pengisian aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja terpadu (SMART) secara tepat waktu dan benar

Rencana aksi

1. Rapat koordinasi internal evaluasi pelaksanaan anggaran
2. Telah menyusun surat Keputusan Rencana Kerja/Kegiatan Tahun 2022 berikut rencana kebutuhan dana kegiatanMenyusun penyediaan uang persediaan sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan
3. Menjaga konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai rencana dan melakukan revisi Halaman III DIPA menjelang akhir bulan 3/6/9/12
4. Me-review rencana kerja setiap menjelang akhir bulan 3/6/9/12
5. Koordinasi intensif petugas keuangan dengan koordinator kegiatan pada seksi teknis
6. Koordinasi internal petugas yang menangani keuangan, urusan TURT, Pejabat pengadaan/PBJ dan PPK terkait dengan pelaksanaan anggaran
7. Mengisi aplikasi SMART secara tepat waktu dan benar

*IKU.9b-N
Nilai kualitas LK tingkat
UAKPA dan UAKPB*

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan wajib menyampaikan Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB kepada Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W) dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (UAPPB-W) Ditjen Perbendaharaan. IKU ini digunakan untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan dilakukan penilaian laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB yang meliputi kriteria:

- a) Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
- b) keakuratan data laporan keuangan
- c) kepatuhan pelaksanaan anggaran
- d) Penyajian Laporan Keuangan
- e) Partisipasi dan
- f) Laporan BMN.

Formula IKU :

Total nilai berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh UAPPA-W dan UAPPB-W terhadap Laporan Keuangan tingkat UAKPA dan UAKPB

Penjelasan Target dan Realisasi Capaian IKU

IKU		Target	Realisasi	Capaian
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	93,1	112,17

Realisasi Persentase pengelolaan BMN yang optimal tahun 2022 sebesar 93,1
Realisasi tersebut mencapai 112,17 dari target sebesar 83.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Rekonsiliasi internal secara berkala dan melakukan koordinasi dengan seksi lainnya.
2. Melakukan analisis laporan keuangan melalui kertas kerja analisis
3. Mengirim LK UAKPA dan UAKPB KPPN Bogor secara tepat waktu dan lengkap

Kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan di tahun 2022 berfokus pada dukungan pencapaian atas Indeks Pengelolaan Aset (IPA) yang diukur oleh DJKN dan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) yang diukur oleh LKPP serta pencapaian validitas dan completeness master asset. IKU diukur dari 2 komponen yakni persentase dukungan tingkat kualitas pengelolaan BMN dan persentase dukungan tingkat kualitas pengadaan.

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN diukur dari:

A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA),

Terdiri dari komponen Temuan BPK terkait BMN pada KL LKPP, ketepatan waktu penyampaian laporan dan RKBMN, Tindak Lanjut Pengelolaan BMN, Persentase Penyelesaian Temuan BPK terkait BMN, dan persentase BMN memiliki dokumen kepemilikan

B. Persentase Validitas dan Completeness Master Aset

Komponen ini menghitung 2 (dua) kriteria utama, yaitu validitas data sertifikat tanah dan kelengkapan data master aset rumah negara. Validitas data sertifikat tanah bertujuan untuk memastikan bahwa data sertifikat tanah a.n. Pemerintah RI cq. Kementerian Keuangan yang dikuasai oleh Kementerian Keuangan telah diupload dan diisi dengan lengkap, tepat, dan valid. Sedangkan, kelengkapan data master aset rumah negara yaitu melengkapi profil BMN berupa Rumah Negara antara lain 1. detail bangunan (alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan); 2. foto; 3. dokumen seperti SK PSP, SK Golongan, dan SIP (bila ada); 4. batas dan GPS; 5. fasilitas; dan 6. konstruksi.

2. Persentase Pemanfaatan Sistem Pengadaan

Persentase dukungan ITKP yang dijadikan IKU Mandatory di tahun 2022 berfokus pada pemanfaatan sistem aplikasi pengadaan yang terdiri :

a. SiRUP

Pemanfaatan SiRUP diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan SiRUP. Indikator ini diukur dari Total Anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal tahun 2023 yang diumumkan di SiRUP dibandingkan dengan total anggaran dan belanja modal tahun anggaran 2023 yang menjadi target

b. e-Tendering

Pemanfaatan e-Tendering diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Tendering. Indikator ini diukur dari nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di

*IKU.9c-N
Tingkat kualitas
pengelolaan BMN*

SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data nilai pagu E-Tendering (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP

c. e-Purchasing

Pemanfaatan e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Purchasing. Indikator ini diukur dari Jumlah Paket e-Purchasing Selesai dibagi Jumlah Paket e-Purchasing Aktif x 100%. Paket e-Purchasing dinyatakan selesai jika dicatatkan minimal hingga tahapan serah terima. Paket aktif adalah paket E-Purchasing yang memiliki status negosiasi, PPK/Penyedia setuju, kirim, dan selesai.

d. Non e-Tendering dan Non e-Purchasing

Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-Purchasing diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan Non e-tendering dan non e-purchasing. Indikator ini diukur dari Persentase dari data Non E-Tendering dan Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di SPSE) pada aplikasi SPSE dibagi dengan data Non E-Tendering & Non E-Purchasing (Jumlah nilai pagu paket di RUP) pada aplikasi SiRUP.

e. e-Kontrak

Pemanfaatan e-Kontrak diukur menggunakan indikator Persentase Pemanfaatan e-Kontrak. Indikator ini diukur dari Persentase dari data jumlah paket selesai yang dicatatkan rincian kontrak pada fitur E-kontrak di aplikasi SPSE dibagi data jumlah seluruh paket yang telah selesai metode pemilihannya pada aplikasi SPSE.

Dengan adanya indikator tersebut diharapkan ITKP target minimal baik di tahun 2023 dapat tercapai

Formula IKU :

Pengukuran tingkat kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan diukur dari komponen sebagai berikut:

1. Dukungan Tingkat Kualitas Pengelolaan BMN

A. Dukungan Indeks Pengelolaan Aset (IPA) (target: 3,5)

Parameter 1 =	Ketepatan waktu penyampaian laporan (bobot: 35%)
Nilai parameter :	$(SP1 \times 50\%) + (SP2 \times 50\%)$
	Note:
	SP 1.1 : Indeks ketepatan waktu penyampaian LBKPB
	SP 1.2 : Indeks ketepatan waktu penyampaian laporan wasdal
Paramater 1.1 =	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Barang Kuasa Pengguna Barang (LBKPB)
	LBKPB sebagai berikut:
Tanggal penerimaan > H+3	Indeks 1 (Sangat Tidak Tepat Waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak Tepat Waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat Waktu)
Tanggal Penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu)

Parameter 1.2 =	Ketepatan waktu penyampaian Laporan Wasdal
	berikut:
	Indeks parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sbb:
Tanggal penerimaan > H+3	Indeks 1 (Sangat Tidak Tepat Waktu)
H-0 < Tanggal penerimaan ≤ H+3	Indeks 2 (Tidak Tepat Waktu)
H-3 < tanggal penerimaan ≤ H-0	Indeks 3 (Tepat Waktu)
Tanggal Penerimaan ≤ H-3	Indeks 4 (Sangat Tepat Waktu)

Realisasi Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan tahun 2022 sebesar 116,07 Realisasi tersebut mencapai 116,07 dari target sebesar 100.

Tindakan yang telah dilaksanakan

1. Melengkapi data BMN pada aplikasi SIMAN
2. Berkoordinasi dengan Seksi Perlengkapan Setditjen Perbendaharaan
3. Melengkapi data Dokumen RP4 (beserta revisinya),
4. Melengkapi data pada Aplikasi SiRUP,
5. Laporan Barang Pengguna Tahun 2021 unaudited, Dokumen Perencanaan Optimalisasi BMN Terindikasi Idle, Dokumen RKA-KL Tahun Anggaran 2023, Dokumen Penganggaran TA 2022
6. Penginputan data rencana pengadaan pada <https://pbj-eprime.kemenkeu.go.id> dan pelaksanaan pengadaan langsung pada <https://www.simpel.lpse.kemenkeu.go.id/>

Capaian Inisiatif Strategis

Pada tahun 2022, KPPN Bogor mempunyai 1 (satu) Inisiatif Strategis yaitu :

1. Tingkat implementasi Learning Organization Pada Unit Kerja

Adapun capaian pelaksanaan Inisiatif Strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis :
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi
2. Output/Outcome :
Q2 s.d. Q4 : Pendokumentasian kegiatan Learning Organization

Target waktu penyelesaian : Januari s.d. Desember 2022

Keterangan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan Inisiatif Strategis sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan yang mendukung capaian implementasi LO.
2. Melengkapi dokumen pendukung penginputan data capaian pada aplikasi LO.

Menginput data dan dokumen pendukung secara tepat waktu pada <http://10.242.231.204/training>.

2. Pendampingan Secara Rutin Kepada Satuan Kerja Dengan Kinerja (IKPA) Rendah

Adapun capaian pelaksanaan Inisiatif Strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis :
Organisasi dan SDM yang optimal dan berkinerja tinggi / Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L
2. Output/Outcome :
Laporan Pelaksanaan kegiatan

Keterangan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan Inisiatif Strategis sebagai berikut :

1. Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sakti dan Implementasi Digipay tanggal 21-29 Maret 2022. Pada kegiatan Bimtek Aplikasi SAKTI dilaksanakan monitoring dan evaluasi IKPA pada Satuan kerja dengan nilai rendah.
2. Bimtek Optimalisasi KKP & Monev Atas Reformulasi Ikpa Indikator Pengelolaan Up/Tup, Serta Sosialisasi Anti Gratifikasi tanggal 25 dan 30 Mei 2022
3. Bimbingan Teknis Akselerasi Penyerapan Anggaran Belanja Satker Lingkup KPPN Bogor mulai tanggal 20 September s.d. 4 Oktober 2022
4. Kegiatan Rilis Kinerja APBN dan Penyerahan DIPA Tahun 2023 diwilayah KPPN Bogor pada tanggal 14 Desember 2022

3. Melakukan Pendampingan secara Intensif kepada Satuan Kerja Agar Segera Bertransaksi di Digipay

Adapun capaian pelaksanaan Inisiatif Strategis adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Strategis :
Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien / Indeks implementasi Digipay
2. Output/Outcome :
Laporan Progres Implementasi Digipay

Target waktu penyelesaian : Januari s.d. Desember 2022

Keterangan :

Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka menyelesaikan Inisiatif Strategis sebagai berikut :

1. Sosialisasi Implementasi Digital Payment - Marketplace pada tanggal 17 Februari 2022
2. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Sistem Marketplace dan Digital Payment pada tanggal 02 Maret 2022
3. Kegiatan Bimbingan Teknis Aplikasi Sakti dan Implementasi Digipay tanggal 21-29 Maret 2022
4. Bimtek Optimalisasi Kkp & Monev Atas Reformulasi Ikpa Indikator Pengelolaan Up/Tup, Serta Sosialisasi Anti Gratifikasi tanggal 25 dan 30 Mei 2022
5. Monitoring dan Evaluasi implementasi Digipay 16 dan 26 Agustus 2022

B. REALISASI ANGGARAN

1. Realisasi DIPA KPPN Bogor TA 2022

Berdasarkan data per 16 Januari 2023 dengan menggunakan *online monitoring* SPAN, realisasi penyerapan DIPA KPPN Bogor tahun anggaran 2022 untuk semua jenis belanja sebesar Rp2.650.661.044,- atau mencapai 99,17% dari total pagu sebesar Rp2.672.796.000,-. Seluruh kegiatan KPPN Bogor dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) jenis belanja. Untuk realisasi per jenis belanja pada tahun 2022 dengan rincian sbb:

- a. Realisasi belanja pegawai mencapai sebesar Rp418.804.000,- (99,68%) dari pagu sebesar Rp420.156.000,-,
- b. Realisasi belanja barang mencapai sebesar Rp2.231.857.044,- (99,08%) dari pagu sebesar Rp2.252.640.000,

Adapun rincian perbandingan pagu dan realisasi tahun 2022 dan tahun 2021 sebagai berikut :

Uraian	TA 2022		TA 2021	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Pegawai	420.156.000,00	418.804.000,00	449.360.000,00	446.218.000,00
Belanja Barang	2.252.640.000,00	2.231.857.044,00	2.117.704.000,00	2.070.043.866,00
Belanja Modal	-	-	1.282.610.000,00	1.276.887.007,00
Belanja Subsidi	-	-	-	-
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-
	2.672.796.000,00	2.650.661.044,00	3.849.674.000,00	3.793.148.873,00

Tabel.3.3

Penurunan Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 dari tahun 2021 disebabkan karena adanya beberapa pegawai KPPN Bogor yang pensiun. Kenaikan Pagu dan Realisasi Belanja Barang disebabkan oleh penambahan anggaran belanja barang.

2. Perbandingan Pagu DIPA dan Realisasi DIPA KPPN Bogor per Output Kegiatan

Berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KPPN Bogor pada tahun anggaran 2022. KPPN Bogor melaksanakan 2 program dengan 17 Output Kegiatan. Adapun realisasi DIPA atas output kegiatan tersebut pada tahun 2022 ditunjukkan pada tabel 3.4

Kode	Output/Kegiatan	Pagu	Realisasi	%
------	-----------------	------	-----------	---

CD	Program Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko	89.196.000	86.207.070	96.65%
	4803.FAE	6.832.000	6.800000	99.53%
	6212.FAH	14.872.000	14.810.710	99.59%
	6212.FAL	48.782.000	47.775.900	97.94%
	6213.FAC	2.878.000	2.876.000	99.93%
	6213.FAL	9.832.000	8.038.000	81.75%
	6214.FAL	4.000.000	3.921.520	98.04%
	6215.FAH	2.000.000	1.984.940	99.25%
WA	Program Dukungan Manajemen	2.583.600.000	2.564.453.974	99.26%
	4715.EBA	2.123.714.000	2.106.837.964	99.20%
	4715.EBB	2.610.000	2.609.200	99.97%
	4715.EBD	5.800.000	5.701.900	98.31%
	4718.BMB	17.500.000	16.812.550	96.07%
	4719.EBA	424.656.000	423.217.360	99.66%
	4719.EBC	9.320.000	9.275.000	99.52%
	Jumlah	2.672.796.000	2.650.661.044	99.17%

Sebagaimana ditunjukkan Tabel.3.4 di atas presentase realisasi paling kecil ada pada output kegiatan pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pembiayaan (6213.FAL), yaitu dengan penyerapan sebesar 81,75% yang disebabkan karena adanya pembayaran perjalanan dinas tidak dilaksanakan secara offline namun online disebabkan adanya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung.

3. Analisis atas efisiensi penggunaan atas Sumber Daya

Sebagaimana dijelaskan dalam Nota dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-2410/PB.1/2022 tanggal 13 Juli 2022 hal Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan II Tahun Anggaran 2022 Lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV tahun 2022 sbb :

Indikator IKU PKPA		Nilai	Bobot	Kinerja Q4
A. NILAI IKPA			40%	39,78
1	Revisi DIPA	100	10%	10,00
2	Deviasi Hal III DIPA	100	10%	10,00
3	Penyerapan Anggaran	97,29	20%	19,46
4	Belanja Kontraktual	100	10%	10,00
5	Penyelesaian Tagihan	100	10%	10,00
6	Pengelolaan UP dan TUP	100	10%	10,00
7	Dispensai SPM	100	5%	5,00
8	Capaian Output	100	25%	25,00
TOTAL Nilai IKPA			100%	99,46
B. NILAI SMART (Tahunan)			60%	59,54
1	Penyerapan	93,23	9,7%	9,04
2	Konsistensi	99,44	18,2%	18,10
3	CRO	100,00	43,5%	43,50
4	Efisiensi	20,00		
5	Nilai Efisiensi	100,00	28,6%	28,60
TOTAL Nilai SMART			100%	99,24
NILAI CAPAIAN IKU PKPA Q4 (TOTAL CAPAIAN/TOTAL BOBOT)				99,33

Gambar 3.1

Berdasarkan perhitungan diatas diperoleh data bahwa nilai efisiensi sebesar 28,6%.

C. KINERJA LAINNYA

Selain 9 (sembilan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 (dua puluh) IKU yang diterapkan oleh KPPN Bogor dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, KPPN Bogor juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2022 yang tidak masuk dalam Kontrak Kinerja KPPN Bogor, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi KPPN Bogor. Kinerja lain yang diperoleh selama tahun 2022, yaitu

1. Terbaik Ketiga Kategori KPPN Tipe A1 Non Provinsi Akselerasi Pembinaan Jafung PK APBN dan Jafung Analis Pengelolaan Keuangan APBN Lingkup Kanwil DJPb dan KPPN Tahun 2022 oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan



Gambar 3.1

2. Terbaik II Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2022 Kategori KPPN Tipe A1 Non Ibu Kota Provinsi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan



Gambar 3.2

3. Peringkat Kedua Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Selaku Kuasa BUN KPPN Tipe A1 Dengan Mitra Kerja Lebih dari 120 Satker Lingkup Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat Periode Semester I Tahun 2022 oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.3

4. Peringkat Pertama Hasil Penilaian LK Tingkat Kuasa BUN-D Tahun 2021 Kategori KPPN Tipe A1 Dengan Jumlah Satker lebih dari 120 oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat



Gambar 3.3

BAB IV

PENUTUP

- Simpulan Umum atas Capaian Kinerja Organisasi
- Langkah Perbaikan di masa yang akan datang

***Simpulan
umum atas
capaian
kinerja
organisasi***

Laporan Kinerja (LAKIN) KPPN Bogor Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pencapaian visi misi KPPN Bogor dalam tahun anggaran 2022 dan disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pencapaian kinerja KPPN Bogor tahun 2022 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana keseluruhan IKU yaitu sebanyak 20 (dua puluh) IKU telah tercapai target yang ditentukan. Secara umum kinerja KPPN Bogor tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) KPPN Bogor yang diukur berdasarkan pengelolaan kinerja berbasis *balance scorecard* (BSC) mencapai 105,7.
- b. Seluruhnya IKU mencapai target yang telah ditetapkan dan terdapat 3 (tiga) IKU yang capaian kerjanya dapat memberikan nilai yang maksimal yaitu sampai dengan 120%.

***Langkah
perbaikan di
masa yang
akan datang***

Meskipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, KPPN Bogor secara berkelanjutan berusaha mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU dan untuk terus meningkatkan kinerja secara optimal.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik kepada pimpinan maupun seluruh pihak terkait sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA (LAKIN)
KPPN BOGOR
TAHUN 2022**



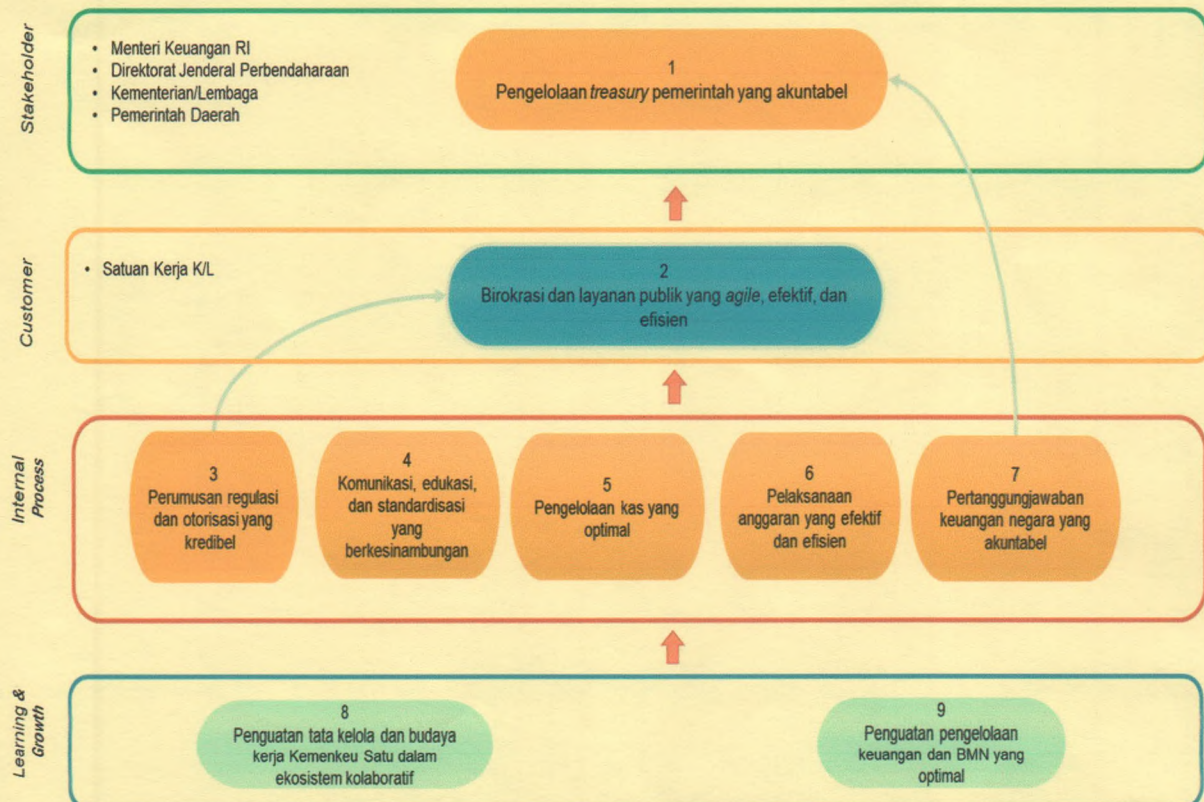
KONTRAK KINERJA
NOMOR : 023/PB.22/2022
KEPALA KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Pernyataan Kesanggupan

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor, saya akan:

1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapan pun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BOGOR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel	1a-CP Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		1b-N Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95
2.	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	2a-N Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)
3.	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4.	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-CP Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100%
		4b-N Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90%
		4c-N Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5
5.	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		5b-N Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (Skala 4)
6.	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	85
		6b-N Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (Skala 4)
		6c-N Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7.	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7a-CP Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (Skala 4)
		7b-N Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%
8.	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84,5
		8b-N Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		8c-N Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		9b-N Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		9c-N Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%

Program/Kegiatan

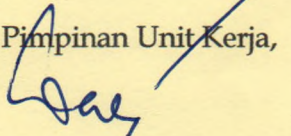
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara,
dan Resiko

Anggaran

Rp. 2.442.972.090

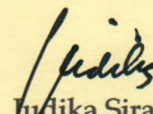
Bandung, 31 Januari 2022

Atasan Pimpinan Unit Kerja,



Dedi Sopandi
NIP 196204241982101001

Pimpinan Unit Kerja,



Judika Sirait
NIP 197102031997031002

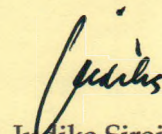
RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

Kode SS/ IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
I	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel							
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89	89	89	89	89	89
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	-	-	-	-	-	95	95
II	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i>, efektif, dan efisien							
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	-	4,65 (skala 5)	4,65 (skala 5)	-	4,65 (skala 5)	-	4,65 (skala 5)
III	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel							
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%	99,4%
IV	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan							
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	21%	46%	46%	76%	76%	100%	100%
4b-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	-	88,5	88,5	-	88,5	88,5	88,5
4c-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	50%	65%	65%	80%	80%	90%	90%
V	Pengelolaan kas yang optimal							
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas KPPN	83%	83%	83%	83%	83%	83%	83%
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)	3,15 (skala 4)
VI	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien							
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	85	85	85	85	85	85	85
6b-N	Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)	3 (skala 4)
6c-N	Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90	90	90	90	90	90	90

Kode SS/ IKU	Indikator Kinerja Utama	Target						
		Q1	Q2	Smt 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
VII	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel							
7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)	3,25 (skala 4)
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%	98,5%
VIII	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif							
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	-	-	-	-	-	84,5	84,5
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	-	-	-	-	-	85	85
8c-N	Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	-	-	-	-	-	78	78
IX	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal							
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	-	-	-	-	-	83	83
9c-N	Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%

Bandung, 31 Januari 2022

PNS yang dinilai,



Judika Sirait
NIP 197102031997031002

SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

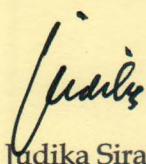
PERIODE PENILAIAN:
1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2022

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Judika Sirait	NAMA	Dedi Sopandi
NIP	197102031997031002	NIP	196204241982101001
PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Tk. I/ IV-b	PANGKAT/GOL RUANG	Pembina Utama Madya / IV-d
JABATAN	Kepala Kantor	JABATAN	Kepala Kantor Wilayah
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor	UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan provinsi Jawa Barat
NO	RENCANA KINERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
A. KINERJA UTAMA			
1	Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89
		Nilai kualitas LK BUN KPPN	95
2	Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65 (Skala 5)
3	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	Persentase Penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,4%
4	Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	
		Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	100%
		Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	90%
5	Pengelolaan kas yang optimal	Persentase akurasi perencanaan kas	83%
		Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15 (Skala 4)
6	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	85
		Indeks implementasi <i>Digipay</i>	3 (Skala 4)
		Tingkat partisipasi pelaporan data capaian output satker	90
7	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi Tingkat UAKPA	3,25 (Skala 4)
		Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,5%

8	Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis <i>Strategy Focused Organization</i>	84,5
		Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85
		Nilai rata-rata <i>hard competency</i> pegawai	78
9	Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%
		Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83
		Persentase kualitas pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
B. KINERJA TAMBAHAN			
-	-	-	-

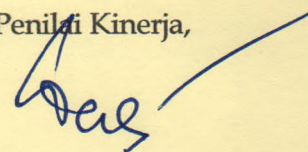
Bandung, 31 Januari 2022

Pegawai Yang Dinilai,



Judika Sirait
NIP 197102031997031002

Pejabat Penilai Kinerja,



Dedi Sopandi
NIP 196204241982101001

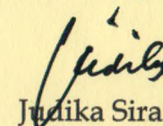
INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2022

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1.	SS: Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif	Tingkat Implementasi <i>Learning Organization</i> pada Unit Kerja	Pemenuhan indikator-indikator pengukuran tingkat implementasi <i>Learning Organization</i> dengan metode <i>self assessment</i> Target: Pemenuhan minimal masing-masing indikator <i>self assessment</i> 80%	Q2:Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q2: 40%	April s.d. Desember 2022	Kepala KPPN	
				Q3:Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q3: 60%			
				Q4:Pendokumentasian kegiatan <i>Learning Organization</i>	Q4: 80%			
2.	SS : Pengelolaan <i>treasury</i> pemerintah yang akuntabel IKU : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	Monitoring dan Evaluasi Intensif Satuan Kerja dengan Kinerja (IKPA) Rendah	Meningkatnya rata-rata nilai IKPA Kementerian/Lemba ga	Pelaksanaan monitoring IKPA setiap triwulan .	Laporan Pelaksan aan kegiatan	April s.d. Desember 2022	Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal Dan Pejabat Fungsional	

No	SS/IKU	Inisiatif Strategis	Output/ Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
3.	SS : Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien IKU : Indeks implementasi Digipay	Melakukan Percepatan Pertambahan Satuan Kerja di Digipay	Bertambahnya Satuan Kerja yang melakukan transaksi melalui marketplace (Satker dan transaksi)	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Aplikasi Digital Payment Marketplace-Digipay.	Laporan Progres Implementasi Digipay	Januari s.d. Juni 2022	Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal	

Bandung, 31 Januari 2022

PNS Yang Dinilai,



Judika Sirait

NIP 197102031997031002

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPPN Bogor
Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2022

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Pol	V/C*	Bobot	Bobot Tertimbang	Indeks Capaian IKU/NSS/Np
Stakeholder (30.00)								102.05
1. Pengelolaan treasury pemerintah yang akuntabel								102.05
1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89.00	89.10	Maximize	Proxy Low	19.00%	50.00%	100.11
1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95.00	98.78	Maximize	Proxy Low	19.00%	50.00%	103.98
Customer (20.00)								101.72
2. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien								101.72
2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4.65	4.73	Maximize	Exact Moderate	21.00%	100.00%	101.72
Internal Process (25.00)								108.07
3. Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel								100.48
3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99.40	99.88	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	100.00%	100.48
4. Komunikasi, edukasi, dan standarisasi yang berkesinambungan								101.47
4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100.00	100.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	100.00
4b-N	Persentase tingkat implementasi standarisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90.00	92.07	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.30
4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88.50	90.40	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	102.14
5. Pengelolaan kas yang optimal								114.90
5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83.00	91.14	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	109.80
5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3.15	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
6. Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien								112.83
6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa	90.00	99.26	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	110.29
6b-N	Indeks Implementasi Digipay	3.00	3.83	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	120.00
6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	90.00	95.04	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	105.60
7. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel								110.65
7a-CP	Indeks Kualitas Pelaksanaan Rekonsiliasi tingkat UAKPA	3.25	4.00	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	120.00
7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98.50	99.77	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	50.00%	101.29
Learning and Growth (25.00)								110.88
8. Penguatan tata kelola dan budaya kerja Kemenkeu Satu dalam ekosistem kolaboratif								110.42
8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84.50	85.82	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	101.56
8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85.00	95.91	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	112.84
8c-N	Nilai rata – rata hard competency pegawai	78.00	91.17	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	33.33%	116.88
9. Penguatan pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal								111.33
9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95.50	99.33	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	104.01
9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83.00	93.10	Maximize	Proxy Moderate	14.00%	29.79%	112.17
9c-N	Persentase Kualiatas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100.00	116.07	Maximize	Proxy Low	19.00%	40.43%	116.07
NILAI KINERJA ORGANISASI								105.70

Bogor, 13 Januari 2023

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Judika Sirait



Formulir Pengukuran Kinerja

Unit Organisasi/Eselon III : KPPN Bogor

Tahun Anggaran : 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	IKU	Target	Realisasi	%
1	Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel	1a-CP	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran K/L	89	89,10	100,11%
2	Pengelolaan Perbendaharaan yang akuntabel	1b-N	Nilai kualitas LK Kuasa BUN KPPN	95	98,78	103,98%
3	Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	2a-N	Indeks kepuasan satker terhadap layanan KPPN	4,65	4,73	101,72%
4	Perumusan regulasi dan otorisasi yang kredibel	3a-N	Persentase penyelesaian SP2D secara tepat waktu	99,40%	99,88%	100,48%
5	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4a-CP	Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	100	100	100,00%
6	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4b-N	Persentase tingkat implementasi standardisasi kompetensi pejabat perbendaharaan	90	92,07	102,30%
7	Komunikasi, edukasi, dan standardisasi yang berkesinambungan	4c-N	Tingkat efektivitas edukasi di bidang pengelolaan perbendaharaan	88,5	90,4	102,15%
8	Pengelolaan kas yang optimal	5a-CP	Persentase akurasi perencanaan kas	83,00%	91,14%	109,81%
9	Pengelolaan kas yang optimal	5b-N	Indeks efektivitas pengelolaan pengeluaran kas	3,15	4	120,00%
10	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6a-CP	Nilai kinerja penyaluran Dana transfer ke daerah dan Dana Desa Persentase tingkat implementasi Aplikasi SAKTI	90	99,26	110,29%
11	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6b-N	Indeks implementasi digipay	3	3,83	120,00%
12	Pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien	6c-N	Tingkat Partisipasi Pelaporan Data Capaian Output Satker	90	95,04	105,60%
13	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7a-CP	Indeks kualitas pelaksanaan rekonsiliasi tingkat UAKPA	3,25	4	120,00%
14	Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel	7b-N	Persentase LPJ Bendahara yang andal dan tepat waktu	98,50%	99,77%	101,29%

15	Penguatan tata kelola dan budaya kerja kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	8a-N	Nilai kualitas pengelolaan kinerja berbasis Strategy Focused Organization	84,50	85,82	101,56%
16	Penguatan tata kelola dan budaya kerja kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	8b-N	Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal	85	95,91	112,84%
17	Penguatan tata kelola dan budaya kerja kemenkeu satu dalam ekosistem kolaboratif	8c-N	Nilai rata –rata hard competency pegawai	78	91,17	116,88%
18	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran KPPN	95,5%	99,33%	104,01%
19	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9b-N	Nilai kualitas LK tingkat UAKPA dan UAKPB	83	93,10	112,17%
20	Penguatan Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal	9c-N	Tingkat kualitas pengelolaan BMN	100%	116,07%	116,07%

Jumlah Anggaran Program Tahun 2022 : Rp2,672,796,000,-

Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2022 : Rp2,650,661,044,-

Bogor, 24 Januari 2023

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
 ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 1

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
015.08.CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko			89,196,000	
4803	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			6,832,000	
4803.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan[Base Line]	2.0 Laporan		6,832,000	
	Lokasi : KOTA BOGOR				
4803.FAE.001	Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	2.0 Rekomendasi		6,832,000	
100	Tidak ada komponen			6,832,000	U
A	Monev Penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro			6,832,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			5,152,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 4 KL]	8.0 OK	300,000	2,400,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 4 KL x 1 HR]	8.0 OH	344,000	2,752,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.023-Bogor)			1,680,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 1 HR x 7 KL]	14.0 OK	120,000	1,680,000	
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi			63,654,000	
6212.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]	2.0 Laporan		14,872,000	
	Lokasi : KOTA BOGOR				
6212.FAH.001	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	2.0 Orang		14,872,000	
100	Tidak ada komponen			14,872,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,872,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.023-Bogor)			14,872,000	RM
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	1.0 Keg	2,000,000	2,000,000	
	- Konsumsi Peserta Satker [151 STKR x 2 ORG x 2 KEG]	604.0 OK	20,000	12,080,000	
	- Konsumsi Narasumber dan Panitia [12 ORG x 1 KEG]	12.0 OK	66,000	792,000	
6212.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	8.0 Dokumen		48,782,000	
	Lokasi : KOTA BOGOR				
6212.FAL.004	Konsultasi Pencairan Dana	8.0 Kegiatan		48,782,000	
100	Tidak ada komponen			48,782,000	U
A	Konsultasi			2,574,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.023-Bogor)			2,574,000	RM
	- Konsumsi Peserta Pemda [3 PEMDA x 3 ORG x 2 KEG]	18.0 OK	66,000	1,188,000	
	- Konsumsi Peserta LKBB [4 LKBB x 2 ORG x 2 KEG]	16.0 OK	66,000	1,056,000	
	- Konsumsi Peserta KPPN [5 ORG x 1 KEG]	5.0 OK	66,000	330,000	
B	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis			36,276,000	
521211	Belanja Bahan (KPPN.023-Bogor)			36,276,000	RM
	- ATK dan Bahan Habis Pakai	3.0 KEG	1,004,000	3,012,000	
	- Konsumsi Peserta Satker [159 STKR x 1 ORG x 3 KEG]	477.0 OK	66,000	31,482,000	
	- Konsumsi Peserta Narasumber dan Panitia [9 ORG x 3 KEG]	27.0 OK	66,000	1,782,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 2

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
C	Pembinaan Satker			9,932,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			8,132,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 2 KL]	4.0 OK	259,000	1,036,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 2 HR]	4.0 OH	570,000	2,280,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 7 KL x 1 HR]	14.0 OH	344,000	4,816,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.023-Bogor)			1,800,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 2 HR x 3 KL]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko			12,710,000	
6213.FAC	Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara[Base Line]	2.0 Orang		2,878,000	
6213.FAC.001	Lokasi : KOTA BOGOR Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	2.0 Pegawai		2,878,000	
100	Tidak ada komponen			2,878,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			2,878,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			2,878,000	RM
	- Transport [2 Orang x 1 Hari x 2 KL]	4.0 OK	250,500	1,002,000	
	- Akomodasi [2 Oang x 1 Hari x 1 KL]	2.0 OH	250,000	500,000	
	- Uang Harian [2 Orang x 2 Hari x 1 KL]	4.0 OH	344,000	1,376,000	
6213.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	2.0 Dokumen		9,832,000	
6213.FAL.001	Lokasi : KOTA BOGOR Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	1.0 Rekomendasi		4,916,000	
100	Tidak Ada Komponen			4,916,000	U
A	Monev Bank/Pos			4,916,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			3,116,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	300,000	600,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 1 HR]	2.0 OH	570,000	1,140,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 2 HR]	4.0 OH	344,000	1,376,000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.023-Bogor)			1,800,000	RM
	- Transport Lokal [2 ORG x 3 KL x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000	
6213.FAL.003	Reviu Belanja Pemerintah	1.0 Rekomendasi		4,916,000	
100	Tidak ada komponen			4,916,000	U
A	Monev Pelaksanaan Anggaran			4,916,000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa (KPPN.023-Bogor)			3,116,000	RM
	- Transport [1 KAB x 2 ORG x 1 KL]	2.0 OK	300,000	600,000	
	- Akomodasi [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 1 HR]	2.0 OH	570,000	1,140,000	
	- Uang Harian [1 KAB x 2 ORG x 1 KL x 2 HR]	4.0 OH	344,000	1,376,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 3

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota (KPPN.023-Bogor) - Transport Lokal [2 ORG x 3 KL x 2 HR]	12.0 OK	150,000	1,800,000	RM
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara			4,000,000	
6214.FAL	Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran dan Pembiayaan[Base Line]	50000.0 Dokumen		4,000,000	

6214.FAL.002	Lokasi : KOTA BOGOR				
100	Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Pengesahan Dana	50000.0 Dokumen		4,000,000	
A	Tidak ada komponen			4,000,000	U
	Pelaksanaan Pencairan/Penarikan/Pengesahan Dana			2,000,000	
521211	Belanja Bahan			2,000,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
B	Penerbitan/Persetujuan/Rekonsiliasi Rekening/SKPP/Konfirmasi Penerimaan Negara, DLL			2,000,000	
521211	Belanja Bahan			2,000,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara			2,000,000	
6215.FAH	Pengelolaan Keuangan Negara[Base Line]	8.0 Laporan		2,000,000	

6215.FAH.003	Lokasi : KOTA BOGOR				
100	Laporan Keuangan BUN	8.0 Laporan		2,000,000	
A	Tidak ada komponen			2,000,000	U
	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN di Daerah			2,000,000	
521211	Belanja Bahan			2,000,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- Pelaksanaan Kearsipan dan Dokumentasi	1.0 THN	2,000,000	2,000,000	
015.08.WA	Program Dukungan Manajemen			2,583,600,000	
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum			2,132,124,000	
4715.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]	36.0 Layanan		2,123,714,000	

4715.EBA.001	Lokasi : KOTA BOGOR				
100	Kerumahtanggaan	12.0 Bulan Layanan		92,000,000	
A	Tidak Ada Komponen			92,000,000	U
	TANPA SUB KOMPONEN			92,000,000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi			92,000,000	RM
	(KPPN.023-Bogor)				
	- ATK dan Supplies Komputer	1.0 Tahun	92,000,000	92,000,000	
4715.EBA.002	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	12.0 Bulan Layanan		14,968,000	
100	Tidak Ada Komponen			14,968,000	U
A	TANPA SUB KOMPONEN			14,968,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 4

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u> (KPPN.023-Bogor) - Transport [2 ORG x 2 KL] - Akomodasi [2 ORG x 2 KL x 2 HARI] - Uang Harian [2 ORG x 11 KL x 1 HARI]	4.0 OK 8.0 OK 22.0 OK	410,000 570,000 344,000	13,768,000 1,640,000 4,560,000 7,568,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.023-Bogor) - Transport Lokal [2 ORG x 5 KL x 1 HR]	10.0 OK	120,000	1,200,000	RM
4715.EBA.994	Layanan Perkantoran	12.0 Bulan		2,016,746,000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor			2,016,746,000	U
A	<i>Keperluan Sehari-Hari Perkantoran</i>			<i>570,867,000</i>	
521111	<u>Belanja Keperluan Perkantoran</u> (KPPN.023-Bogor) - Keperluan Sehari-hari Perkantoran - Kertas Berharga/Materai > Honorarium PPNPN - Honor Satpam [1 ORG x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORN x 13 BLN] - Honor Satpam [2 ORG x 13 BLN] - Honor Sopir [1 ORG x 13 BLN] - Honor Pramubakti [1 ORG x 13 BLN] - Honor Petugas Kebersihan [2 ORG x 13 BLN] - Honor Petugas Kebersihan [3 ORG x 13 BLN] - Uang lembur Satpam, Sopir, Pramubakti dan Petugas Kebersihan [12 ORG x 2 JAM x 40 HARI] - Uang makan lembur Satpam, Sopir, Pramubakti dan Petugas Kebersihan [12 ORG x 40 hari]	1.0 Tahun 1.0 Tahun 13.0 OB 26.0 OB 26.0 OB 13.0 OB 13.0 OB 26.0 OB 39.0 OB 960.0 OJ 480.0 OH	65,440,000 687,000 3,300,000 3,550,000 3,050,000 3,250,000 2,850,000 2,800,000 2,550,000 13,000 30,000	65,440,000 687,000 492,930,000 42,900,000 92,300,000 79,300,000 42,250,000 37,050,000 72,800,000 99,450,000 12,480,000 14,400,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.023-Bogor) - Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan/Laminasi	1.0 THN	1,400,000	1,400,000	RM
521841	<u>Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.023-Bogor) - Persediaan Penanganan Pandemi Covid-19	1.0 THN	10,210,000	10,210,000	RM
522192	<u>Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19</u> (KPPN.023-Bogor) - Biaya Rapid test antigen (Jasa Pihak ke-3) [4 PGW x 1 KL]	4.0 OK	50,000	200,000	RM
B	<i>Langganan Daya dan Jasa</i>			<i>329,612,000</i>	
521114	<u>Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat</u> (KPPN.023-Bogor) - Pos/Pengepakan/Pengiriman/Pengangkutan	1.0 THN	1,600,000	1,600,000	RM
522111	<u>Belanja Langganan Listrik</u> (KPPN.023-Bogor) - Langganan Listrik	1.0 THN	222,952,000	222,952,000	RM

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 5

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522112	<u>Belanja Langganan Telepon</u> (KPPN.023-Bogor) - Langganan Telepon	1.0 THN	13,600,000	13,600,000	RM
522113	<u>Belanja Langganan Air</u> (KPPN.023-Bogor) - Langganan Air	1.0 THN	80,000,000	80,000,000	RM
522119	<u>Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya</u> (KPPN.023-Bogor) - Langganan Zoom Meeting [2 AKUN x 12 BLN] - Langganan Zoom Meeting Update	24.0 AB 6.0 BLN	300,000 710,000	7,200,000 4,260,000	RM
C	<i>Pelaksanaan Operasional Kantor</i>			219,723,000	
521115	<u>Belanja Honor Operasional Satuan Kerja</u> (KPPN.023-Bogor) > Honor Pengelola Keuangan - Honor Pengelola Keuangan - Honor Tim SAI > Honor Pengelola Keuangan BA BUN Dana Desa dan DAK Fisik - KPA [1 ORG x 12 BLN] - PPK [1 ORG x 12 BLN] - PPSPM [1 ORG x 12 BLN] - Staff Pengelola Keuangan [2 ORG x 12 BLN] > Honor Output Kegiatan - Honor Pejabat PBJ [1 ORG x 12 BLN] - Honor Penyimpan dan Pengurus BMN [1 ORG x 12 BLN]	1.0 THN 1.0 THN 12.0 OB 12.0 OB 12.0 OB 24.0 OB 12.0 BLN 12.0 OB	76,686,000 12,870,000 1,250,000 1,210,000 480,000 310,000 680,000 300,000	89,556,000 76,686,000 12,870,000 42,720,000 15,000,000 14,520,000 5,760,000 7,440,000 11,760,000 8,160,000 3,600,000	RM
521119	<u>Belanja Barang Operasional Lainnya</u> (KPPN.023-Bogor) > Pengadaan Seragam - Seragam Pegawai [36 ORG x 1 STEL] - Seragam Satpam [5 ORG x 1 STEL] - Seragam Sopir [1 ORG x 1 STEL] - Seragam Pramubakti [1 ORG x 1 STEL] - Seragam Petugas Kebersihan [5 Orang x 1 STEL] > Obat-obatan dan Dokter - Obat-obatan > Penyelenggaraan Rapat/Jamuan Tamu - Konsumsi rapat/jamuan tamu - Penambah Daya Tahan Tubuh Akhir Tahun Anggaran [40 ORG x 15 HR]	36.0 STEL 5.0 STEL 1.0 STEL 1.0 STEL 5.0 STEL 40.0 ORG 12.0 BLN 600.0 OH	703,000 1,219,000 506,000 503,000 503,000 200,000 1,780,000 19,000	34,927,000 25,308,000 6,095,000 506,000 503,000 2,515,000 8,000,000 8,000,000 32,760,000 21,360,000 11,400,000	RM
D	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</i>			110,971,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 6

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523121	<u>Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin</u> (KPPN.023-Bogor)			110,971,000	RM
	- Kendaraan Roda 4	2.0 Unit	28,850,500	57,701,000	
	- Inventaris Kantor	40.0 OT	46,000	1,840,000	
	- Komputer/Laptop	40.0 Unit	282,000	11,280,000	
	- Printer	40.0 Unit	150,000	6,000,000	
	- AC Standing Floor/Split/Cassette	36.0 Unit	610,000	21,960,000	
	- CCTV	1.0 THN	5,000,000	5,000,000	
	- Genset 50 KVA	1.0 unit	7,190,000	7,190,000	
E	<u>Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u>			785,573,000	RM
523111	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan</u> (KPPN.023-Bogor)			772,823,000	
	- - Pemeliharaan Gedung Kantor Tidak Bertingkat	253.0 M2	59,300	15,002,000	
	- - Pemeliharaan Gedung Kantor Bertingkat	4016.0 M2	178,000	714,848,000	
	- - Pemeliharaan Halaman Kantor	6329.0 M2	6,790	42,973,000	RM
523119	<u>Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya</u> (KPPN.023-Bogor)			12,750,000	
	- Pemeliharaan Bangunan Rumah Dinas Jabatan Kepala Kantor	169.0 M2	66,000	11,154,000	
	- Pemeliharaan Halaman Rumah Dinas Jabatan Kepala Kantor	266.0 M2	6,000	1,596,000	
4715.EBB	<u>Layanan Sarana dan Prasarana Internal[Base Line]</u>	4.0 Unit		2,610,000	RM
	Lokasi : KOTA BOGOR				
4715.EBB.002	<u>Peralatan Fasilitas Perkantoran</u>	4.0 Unit		2,610,000	
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			2,610,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			2,610,000	
521252	<u>Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel</u> (KPPN.023-Bogor)			2,610,000	
	- Jam Dinding	1.0 Unit	500,000	500,000	
	- Net Voley	1.0 Unit	760,000	760,000	
	- Bola Voley	1.0 Unit	700,000	700,000	RM
	- Gergaji Mesin	1.0 Unit	650,000	650,000	
4715.EBD	<u>Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]</u>	3.0 Dokumen		5,800,000	
	Lokasi : KOTA BOGOR				
4715.EBD.001	<u>Rencana Kerja dan Anggaran Unit</u>	1.0 Dokumen		1,800,000	U
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			1,800,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			1,800,000	
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.023-Bogor)			1,800,000	
	- Honor Narasumber (Dinas PU) [1 ORG x 2 JAM]	2.0 OJ	900,000	1,800,000	RM
4715.EBD.003	<u>Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi</u>	2.0 Dokumen		4,000,000	
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			4,000,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			4,000,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
 UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
 UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
 ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 7

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor)			4,000,000	RM
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Kepatuhan Internal	2.0 KEG	1,000,000	2,000,000	
	- Dokumentasi/Pencetakan/Penggandaan dalam rangka Pengelolaan Kinerja	2.0 KEG	1,000,000	2,000,000	
4718	<u>Pengelolaan komunikasi dan informasi publik</u>			17,500,000	
4718.BMB	<u>Komunikasi Publik[Base Line]</u>	153.0 layanan		17,500,000	U

	Lokasi : KOTA BOGOR				
4718.BMB.001	<u>Pembinaan/Edukasi Publik</u>	151.0 Orang		3,500,000	
100	<u>Tidak ada komponen</u>			3,500,000	RM
A	<u>Pelayanan Umum, Rumah Tangga dan Kehumasan</u>			3,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor)			3,500,000	
	- Biaya Pembinaan dan Edukasi Publik	1.0 KEG	3,500,000	3,500,000	
4718.BMB.002	<u>Kehumasan</u>	2.0 Kegiatan		14,000,000	U
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			14,000,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			14,000,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor)			14,000,000	
	- Kehumasan [2 KEG x 1 FREK]	2.0 KEG	7,000,000	14,000,000	RM
4719	<u>Pengelolaan Organisasi dan SDM</u>			433,976,000	
4719.EBA	<u>Layanan Dukungan Manajemen Internal[Base Line]</u>	15.0 Layanan		424,656,000	

	Lokasi : KOTA BOGOR				U
4719.EBA.004	<u>Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan</u>	3.0 Laporan		4,500,000	
100	<u>Tidak Ada Komponen</u>			4,500,000	
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			4,500,000	
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.023-Bogor)			4,500,000	RM
	- Belanja Bahan [2 KEG x 1 FREK]	2.0 KEG	1,000,000	2,000,000	
	- Biaya Persiapan WBK [1 KEG x 1 FREK]	1.0 KEG	2,500,000	2,500,000	
4719.EBA.994	<u>Layanan Perkantoran</u>	12.0 Bulan Layanan		420,156,000	
001	<u>Gaji dan Tunjangan</u>			420,156,000	U
A	<u>TANPA SUB KOMPONEN</u>			420,156,000	
511129	<u>Belanja Uang Makan PNS</u> (KPPN.023-Bogor)			297,036,000	
	- Uang Makan Golongan II [2 ORG x 19 HR x 12 BLN]	456.0 OH	35,000	15,960,000	
	- Uang Makan Golongan III [34 ORG x 18 HR x 12 BLN]	7344.0 OH	37,000	271,728,000	RM
	- Uang Makan Golongan IV [1 ORG x 19 HR x 12 BLN]	228.0 OH	41,000	9,348,000	

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2022

KEMEN/LEMB (015) KEMENTERIAN KEUANGAN
UNIT ORG (08) Ditjen Perbendaharaan
UNIT KERJA (527137) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
ALOKASI Rp. 2,672,796,000

Halaman : 8

KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	PERHITUNGAN TAHUN 2022			SD/ CP
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	<u>Belanja Uang Lembur</u> (KPPN.023-Bogor) - Uang Lembur Golongan II [2 ORG x 2 JAM x 40 HR] - Uang Lembur Golongan III [37 ORG x 2 JAM x 40 HR] - Uang Lembur Golongan IV [1 ORG x 2 JAM x 40 HR] - Uang Makan Lembur Golongan II [2 ORG x 40 HR x 1 KL] - Uang Makan Lembur Golongan III [37 ORG x 40 HR x 1 KL] - Uang Makan Lembur Golongan IV [1 ORG x 40 HR x 1 KL]	160.0 OJ 2960.0 OJ 80.0 OJ 80.0 OH 1480.0 OH 40.0 OH	17,000 20,000 25,000 35,000 37,000 41,000	123,120,000 2,720,000 59,200,000 2,000,000 2,800,000 54,760,000 1,640,000	RM
4719.EBC	<u>Layanan Manajemen SDM Internal[Base Line]</u>	40.0 Orang		9,320,000	
4719.EBC.001	Lokasi : KOTA BOGOR	40.0 Pegawai		9,320,000	
100	Pengembangan SDM			9,320,000	U
A	Tidak Ada Komponen			9,320,000	
	<i>TANPA SUB KOMPONEN</i>			9,320,000	
521219	<u>Belanja Barang Non Operasional Lainnya</u> (KPPN.023-Bogor) > Peningkatan Kualitas SDM - Konsumsi [45 ORG x 1 KL] - Barang Habis Pakai [80 ORG x 1 KL]	45.0 OK 80.0 OK	66,000 50,000	6,970,000 2,970,000 4,000,000	RM
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u> (KPPN.023-Bogor) - Honor Narasumber [1 ORG x 2 JAM x 1 KL] - Honor Rohaniawan	2.0 OJ 1.0 KEG	900,000 400,000	2,200,000 1,800,000 400,000	RM
524113	<u>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota</u> (KPPN.023-Bogor) - Transport Narasumber [1 ORG x 1 KL]	1.0 OK	150,000	150,000	RM

Catatan : 1. U = Komponen Utama
2. P = Komponen Penunjang
3. * = Blokir

Bogor, 8 November 2022

JUDIKA SIRAIT
NIP 197102031997031002

RENCANA KEGIATAN TAHUN 2022

SEKSI BANK

No.	Kegiatan	Waktu	RAB	Tempat	Keterangan
1	Konsultasi-Belanja Bahan/Konsumsi				
a	Sosialisasi/Koordinasi dengan Pemda	Feb-22	5.005.000	Aula	Peserta Pemda & OPD (77 org)
					per pemda 23 org, kppn 7 org
		Oct-22	1.040.000	Mini TLC	Peserta Pemda (16 orang)
					per pemda 4 org, kppn 4 org
b	Sosialisasi/Koordinasi dengan LKBB	April 2022	780.000	Mini TLC	Peserta LKBB Masing2 2 org (12 org)
					kppn 4 orang
		November 2022	780.000	Mini TLC	Peserta LKBB Masing2 2 org (12 org)
					kppn 4 orang
c	Sosialisasi/Koordinasi dengan Bank/Pos	Oktober 2022	3.250.000	Aula	Peserta (50 org), per bank 1 org
					kppn 5 orang
			10.855.000		Sisa dana Rp 35.000,-
2	Monev Dana Transfer				
a	Luar Kota				
1)	Monev Semester I	Juni 2022	750.000	Bappenda Kab Bogor	(3 orang x Rp 250.000)
			750.000	Bagian Pembangunan Pemkot Depok	(3 orang x Rp 250.000)
			500.000	DPMD Kabupaten Bogor	(2 orang x Rp 250.000)
2)	Rekon Pajak Pusat Semester I	Januari 2022	500.000	BPKAD Kota Depok	(2 orang x Rp 250.000)
			500.000	BPKAD Kabupaten Bogor	(2 orang x Rp 250.000)
3)	Monev Semester II	November 2022	750.000	Bappenda Kab Bogor	(3 orang x Rp 250.000)
			750.000	Bagian Pembangunan Pemkot Depok	(3 orang x Rp 250.000)
			750.000	DPMD Kabupaten Bogor	(3 orang x Rp 250.000)
4)	Rekon Pajak Pusat Semester II	Juli 2022	500.000	BPKAD Kota Depok	(2 orang x Rp 250.000)
			500.000	BPKAD Kabupaten Bogor	(2 orang x Rp 250.000)
			6.250.000		Sisa dana Rp 82.000,-
b	Dalam Kota				
1)	Monev Semester I	Juni 2022	300.000	BPKAD Kota Bogor	(2 orang x Rp 150.000)
2)	Rekon Pajak Pusat Semester I	Januari 2022	300.000	BPKAD Kota Bogor	(2 orang x Rp 150.000)
3)	Monev Semester II	November 2022	300.000	BPKAD Kota Bogor	(2 orang x Rp 150.000)
4)	Rekon Pajak Pusat Semester II	Juli 2022	300.000	BPKAD Kota Bogor	(2 orang x Rp 150.000)
			1.200.000		Sisa dana Rp 0,-
3	Monev Ultra Mikro/Kredit Program				
a	Luar Kota				
1)	UMi TW 1	Februari	500.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 250.000) /

					(1 keg x 2 org x Rp 250.000)
2)	UMi TW 2	Mei	500.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 250.000) /
					(1 keg x 2 org x Rp 250.000)
3)	UMi TW 3	Agustus	500.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 250.000) /
					(1 keg x 2 org x Rp 250.000)
4)	UMi TW 4	November	500.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 250.000) /
					(1 keg x 2 org x Rp 250.000)
5)	KUR Semester 1	April	500.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 250.000) /
					(1 keg x 2 org x Rp 250.000)
6)	KUR Semester 2	Oktober	500.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 250.000) /
					(1 keg x 2 org x Rp 250.000)
			3.000.000		Sisa dana Rp 166.000,-
b.	Dalam Kota				
	UMi TW 1	Februari	150.000	Debitur	(1 keg x 1 org x Rp 150.000)
	UMi TW 2	Mei	150.000	Debitur	(1 keg x 1 org x Rp 150.000)
	UMi TW 3	Agustus	150.000	Debitur	(1 keg x 1 org x Rp 150.000)
	UMi TW 4	November	150.000	Debitur	(1 keg x 1 org x Rp 150.000)
	KUR Semester 1	April	300.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 150.000) /
					(2 keg x 1 org x Rp 150.000) /
	KUR Semester 2	Oktober	300.000	Debitur	(2 keg x 1 org x Rp 150.000) /
					(2 keg x 1 org x Rp 150.000) /
			1.200.000		Sisa dana Rp 0,-
4	Monev Bank/Pos				
a	Luar Kota				
	TW 1	Maret	1.000.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Depok	(2 keg x 2 orang x Rp 250.000)
	TW 2	Juni	1.000.000	B/P Persepsi di wilayah Kab Bogor	(2 keg x 2 orang x Rp 250.000)
	TW 3	September	1.500.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Depok	(3 keg x 2 orang x Rp 250.000)
	TW 4	Desember	1.000.000	B/P Persepsi di wilayah Kab Bogor	(2 keg x 2 orang x Rp 250.000)
			250.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Depok	(1 keg x 1 orang x Rp 250.000)
			1.500.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Depok	(3 keg x 2 orang x Rp 250.000)
			6.250.000		Sisa dana Rp 82,-
b	Dalam Kota				
	TW 1	Maret	600.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Bogor	(2 keg x 2 orang x Rp 150.000)
	TW 2	Juni	600.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Bogor	(2 keg x 2 orang x Rp 150.000)
	TW 3	September	600.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Bogor	(2 keg x 2 orang x Rp 150.000)
	TW 4	Desember	1.200.000	B/P Persepsi di wilayah Kota Bogor	(4 keg x 2 orang x Rp 150.000)
			3.000.000		Sisa dana Rp 0,-
Total			32.120.000		

SEKSI MSKI

No.	Kegiatan	Waktu	RAB	Tempat	Keterangan
1	Survey Kepuasan Pengguna Layanan				
		April			
			1.600.000		konsumsi peserta (80 x 20.000)
			1.000.000		bahan
		Agustus			
			1.600.000		konsumsi peserta (80 x 20.000)
			1.000.000		bahan
2	Sosialisasi				
		Februari			
			18.206.250		
			1.875.000		
	Sosialisasi	Mei			
			18.206.250		
			1.875.000		
	Sosialisasi	Agustus			
			18.206.250		
			1.875.000		
	Sosialisasi	November			
			18.206.250		
			1.875.000		
3	Pembinaan Satker				
	Monev KKP	Februari			
			1.000.000		
			1.200.000		
		April			
			1.000.000		
			1.200.000		
		Juni			
			1.000.000		
			1.200.000		
		Agustus			
			1.000.000		
			1.200.000		
		Oktober			
			1.000.000		

			1.200.000		
4	Penggandaan dalam Rangka Kepatuhan Internal				
		April	500.000		
		Juli	500.000		
		Oktober	500.000		
		Desember	500.000		
Total			98.525.000		

SEKSI PD

No.	Kegiatan	Waktu	RAB	Tempat	Keterangan
1.1	Pelaksanaan Bimbingan satker				
	Sosialisasi dan Bimtek				
	Sosialisasi langkah2 Strategis Pelaksanaan Anggaran	Februari			
			9.685.000		(149 satker x 65.000)
	Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan I	April			
			9.685.000		(149 satker x 65.000)
	Monev Pelaksanaan Anggaran Triwulan II	Juli			
			9.685.000		(149 satker x 65.000)
	Sosialisasi Pedoman Penerimaan dan Pengeluaran	Desember			
			9.685.000		(149 satker x 65.000)
	Monev PNB				
	Monitoring PNB (Dlm kota)		300.000		(2 org x 150.000)
	Monitoring PNB (Luar kota				
			1.538.000		(2 org x 769.000)
Total			40.578.000		

SEKSI VERAK

No.	Kegiatan	Waktu	RAB	Tempat	Keterangan
1	Sosialisasi & Bimtek Penyusunan LK Tahunan Unaudited TA 2021	Jan-22			
			24.000.000		
2	Sosialisasi & Bimtek Penyusunan LK Semester I TA 2021	Jun-22			
			24.000.000		
Subtotal			48.000.000		
3	Satker Wilayah Kerja KPPN Bogor	Jan-22	1.300.000		

	(Kota Bogor, Kab. Bogor & Kota Depok)	Feb-22	1.300.000		
		Mar-22	1.300.000		
		Apr-22	1.300.000		
		May-22	1.300.000		
		Jun-22	1.300.000		
		Jul-22	1.300.000		
		Aug-22	1.300.000		
		Sep-22	1.300.000		
		Oct-22	1.300.000		
		Nov-22	1.300.000		
4	Konsultasi & Penyampaian LK-UAKBUND	Dec-22	1.300.000		
	(Kanwil DJPB Prov Jawa Barat)	Jan-22	700.000		
		Feb-22	700.000		
		Mar-22	700.000		
		Apr-22	700.000		
		May-22	700.000		
		Jun-22	700.000		
		Jul-22	700.000		
		Aug-22	700.000		
		Sep-22	700.000		
		Oct-22	700.000		
		Nov-22	700.000		
		Dec-22	700.000		
Subtotal			24.000.000		
Total			72.000.000		

Subbag Umum

No.	Kegiatan	Waktu	RAB	Tempat	Keterangan
1	Hari Bhakti Perbendaharaan	14-01-2022			
			3.260.000		
2	Penandatanganan Kontrak Kinerja dan Pakta Integritas Th 2022	31-01-2022			
			1.180.000		
3	GKM Service Excellent dan CapacityBuilding	24-06-2022			
			11.370.000		
Total			15.810.000		

Total Kebutuhan Dana	259.033.000
----------------------	-------------

Seksi Bank	32.120.000
Seksi MSKI	98.525.000
Subbag Umum	15.810.000
Seksi PD	40.578.000
Seksi Verak	72.000.000



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI JAWA BARAT
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 BOGOR
JL. IR. H. JUANDA NO. 62, BOGOR 16122; TELEPON (0251) 8325003, 8325133; FAKSIMILE (0251) 8325472; SUREL
CSO.BOGOR@KEMENKEU.GO.ID; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BOGOR

NOTA DINAS
NOMOR ND-1037/KPN.1304/2022

Yth : Kepala Bagian Umum
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Bogor
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2022
Tanggal : 06 Oktober 2022

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor ND-65/PB.1/PB.11/2022 tanggal 26 September 2022 hal Format Surat Keputusan Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dengan ini kami sampaikan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.



Ditandatangani secara elektronik
Judika Sirait



2
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
KEP-073/KPN.1304/2022

TENTANG

STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
TAHUN 2022

KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, setiap Unit Pemilik Kerja (UPK) di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki Struktur Manajemen Kinerja untuk mendukung pelaksanaan manajemen kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor tentang Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR TAHUN 2022.
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini untuk bertugas dan bertanggung jawab dalam Struktur Manajemen Kinerja di Lingkungan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor.
- KEDUA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri dari:
1. Manajer Kinerja;
 2. Submanajer Kinerja;
 3. Koordinator Kinerja Organisasi (KKO)-*Two*;
 4. Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) -*Two*;
 5. Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-*Two* dan Administrator Kinerja Organisasi (AKO)-*Three*;
 6. Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-*Two* dan Administrator Kinerja Pegawai (AKP)-*Three*;
 7. Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-*Two* dan Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO)-*Three*;
 8. Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-*Two* dan Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP)-*Three*;
 9. *Liaison Officers* (LO) Kinerja Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank dan Seksi verifikasi dan Akuntansi
- KETIGA : Struktur Manajemen Kinerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor ini disampaikan kepada:

1. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bogor

Pada tanggal 03 Oktober 2022

KEPALA KANTOR PELAYANAN

PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik

JUDIKA SIRAT

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
NOMOR : KEP-073/KPN.1304/2022
TENTANG STRUKTUR MANAJEMEN
KINERJA DI LINGKUNGAN KANTOR
PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
BOGOR TAHUN 2022

**STRUKTUR MANAJEMEN KINERJA
DI LINGKUNGAN KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR
TAHUN 2022**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL.	JABATAN	
UPK-Three: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bogor				
1	Judika Sirait NIP 197102031997031002	Pembina Tk. I / IV/b	Kepala KPPN	Submanajer Kinerja
2	Anang Setiawan NIP 197304241999031001	Penata Tk. I / III/d	Kepala Subbagian Umum	Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three
3	Anang Setiawan NIP 197304241999031001	Penata Tk. I / III/d	Kepala Subbagian Umum	Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three
4	Agus Supriyanto NIP 197509181996021002	Penata / III/c	Pelaksana Subbagian Umum	Pendukung Administrator Kinerja Organisasi (PAKO) UPK-Three
5	Agus Supriyanto NIP 197509181996021002	Penata / III/c	Pelaksana Subbagian Umum	Pendukung Administrator Kinerja Pegawai (PAKP) UPK-Three
6	Indrawati Kusuma dewi NIP 197312221994032003	Penata Tk. I / III/d	Pelaksana Seksi	Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Pencairan Dana
7	Dede Rusmiati NIP 197401291994032001	Penata Tk. I / III/d	Pelaksana Seksi	Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
8	Danik Fema Noor Widiyanti NIP 197502051995032001	Penata / III/c	Pelaksana Seksi	Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Bank
9	Sri Mulyani NIP 197407161994022001	Penata / III/c	Pelaksana Seksi	Liaison Officer (LO) Pengelola Kinerja Seksi Verifikasi dan Akuntansi

KEPALA KANTOR PELAYANAN
PERBENDAHARAAN NEGARA BOGOR,



Ditandatangani secara elektronik
JUDIKA SIRAT

